

**AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DI DESA PERHENTIAN LUAS  
KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

*Disusun dan diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi  
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial  
Program Pendidikan Strata Satu  
Program Studi Administrasi Negara*



**OLEH**

**NAMA : WIDA ROSMERIATI  
NPM : 160411110**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN  
2020**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN HASIL KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **WIDA ROSMERIATI**  
NPM : **160411110**  
Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**  
Perguruan Tinggi : **Universitas Islam Kuantan Singingi**  
Alamat : **Desa Perhentian Luas Kec. Logas Tanah Darat**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tulisan yang saya buat atau karya ilmiah yang saya hasilkan dengan judul **Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi** merupakan hasil karya saya sendiri tidak melakukan kegiatan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain.

Apabila terdapat dengan secara sengaja melakukan kegiatan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain, maka saya dengan senang hati bersedia dituntut sesuai dengan prosedur dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan keaslian hasil karya ilmiah atau skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya dan dibuat dengan keadaan sadar serta tidak ada paksaan dari pihak manapun dan siapapun.

Teluk Kuantan, Oktober 2020

**Wida Rosmeriati**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN HASIL KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **WIDA ROSMERIATI**  
NPM : **160411110**  
Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**  
Perguruan Tinggi : **Universitas Islam Kuantan Singingi**  
Alamat : **Desa Perhentian Luas Kec. Logas Tanah Darat**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tulisan yang saya buat atau karya ilmiah yang saya hasilkan dengan judul **Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi** merupakan hasil karya saya sendiri tidak melakukan kegiatan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain.

Apabila terdapat dengan secara sengaja melakukan kegiatan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain, maka saya dengan senang hati bersedia dituntut sesuai dengan prosedur dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan keaslian hasil karya ilmiah atau skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya dan dibuat dengan keadaan sadar serta tidak ada paksaan dari pihak manapun dan siapapun.

Teluk Kuantan, Oktober 2020

**Wida Rosmeriati**

## **ABSTRAK**

# **AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PERHENTIAN LUAS KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Oleh**

**WIDA ROSMERIATI  
NPM. 160411110**

Pembangunan yang belum sepenuhnya terwujud di Desa Perhentian Luas merupakan akses jalan raya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun pemerintah desa tidak memprioritaskan kebutuhan yang paling penting. Pemerintah desa juga kurang melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan yang dilakukan. Kerusakan jalan tersebut menghambat akses perekonomian masyarakat setempat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang didasari dengan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa akuntabilitas kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengancukup baik.

**Kata kunci: Akuntabilitas, pembangunan**

**ABSTRAC**

**VILLAGE HEADQUARTERS ACCOUNTABILITY IN THE  
IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT IN THE VILLAGE OF LAND  
DISTRICT DISTRICT LOGAS LAND  
DISTRICT KUANTAN DISTRICT**

**BY**

**WIDA ROSMERIATI  
NPM. 160411110**

*Development that has not yet been fully realized in Perhentian Luas Village is a road access that is badly needed by the community, but the village government does not prioritize the most important needs. The village government also did not involve the community in any development policies carried out. The road damage has hampered the economic access of the local community.*

*The purpose of this study was to determine the Accountability of Village Heads in Development in Perhentian Luas Village, Logas Tanah Darat District, Kuantan Singingi Regency. The method used in this research is descriptive qualitative and quantitative methods.*

*The location of this research was carried out in Perhentian Luas Village Logas Tanah Darat District, Kuantan Singingi Regency. The method used in this study is to use the method of observation, interviews, documentation, and triangulation.*

*Based on the results of field research based on the results of interviews and observations, it is known that the accountability of the village head in the implementation of development in Perhentian Luas Village, Logas Tanah Darat Subdistrict, Kuantan Singingi Regency has been going well.*

***Keywords: Accountability, development***

## **KATA PENGANTAR**

Bersyukur kita kepada Allah yang sampai saat ini masih memberikan rahmat-Nya serta keridhaan-Nya kepada kita semua. Sehingga dengan adanya petunjuk dan pertolongan dariNya kami dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya.

Shalawat beriringan salam selalu kita ucapkan kepada pimpinan Islam, yakninya nabi kita Muhammad. SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berhalawat kepadanya, kita selalu mendapatkan syafaatnya.

Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan yang ada. Karena keterbatasan ilmu yang dimiliki dan kemampuan kami. Banyak pihak-pihak yang memberikan bantuan, beberapa saran, serta bimbingan kepada kami yang bersifat membangun dalam penulisan penelitian ini.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Tiadalah kata yang patut kami ucapkan selain kata terima kasih kepada dosen pembimbing yang selalu memberi kami pedoman, serta kepada pihak-pihak lain yang ikut membantu, yang bertujuan adalah untuk memberikan yang terbaik untuk kita semua.

Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. **Ibu Ir.Hj Elfi Indrawanis, MM** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. **Bapak Zul Ammar, SE.ME** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. **Bapak Desriadi S.Sos, M.Si** selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dorongan dan semangat serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

4. **Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.S.i** selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. **Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.S.i** selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih juga disampaikan Kepada Bapak/Ibu Dosen, Karyawan Tata Usaha fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materi.
7. Terima kasih juga disampaikan Kepada Orang Tua, saudara, dan sahabat penulis.
8. Serta terima kasih juga untuk rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis berupaya semaksimal mungkin namun jika ada sumbangan pemikiran, kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk lebih sempurnanya penulisan dan pelaksanaan penelitian ini nantinya, akan penulis pertimbangkan.

Teluk Kuantan, September 2020

**Penulis**

**WIDA ROSMERIATI**  
**NPM: 160411110**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	10
2.1. Landasan Teori .....	10
2.1.1. Teori/Konsep Administrasi Negara.....	10
2.1.2. Teori/Konsep Pemerintahan Desa .....	15
2.1.3. Teori/Konsep Organisasi .....	18
2.1.4. Teori/Konsep Pembangunan Desa .....	20
2.1.5. Teori/Konsep Akuntabilitas .....	26
2.1.6. Konsep/Konsep Kepala Desa.....	33
2.2. Kerangka Pemikiran.....	36
2.3. Hipotesis .....	37
2.4. Defenisi Konsep.....	37
2.5. Konsep Operasional .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	40
3.1. Jenis Penelitian .....	40
3.2. Informan .....	40
3.3. Sumber Data .....	41

3.4. Fokus Penelitian.....	41
3.5. Lokasi Penelitian.....	42
3.6. Metode Pengumpulan Data .....	42
3.7. Metode Analisa Data.....	44
3.8. Jadwal Penelitian .....	46
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
4.1. Sejarah Desa Perhentian Luas .....	48
4.2. Agama dan Pendidikan.....	51
4.3. Pemerintahan .....	53
4.4. Sosial Ekonomi .....	54
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
5.1. Identitas Responden .....	60
5.1.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	60
5.1.2. Responden Berdasarkan Usia .....	60
5.1.3. Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	61
5.1.4. Responden Berdasarkan Pendidikan.....	62
5.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	62
5.2.1. Indikator Memberikan Tanggapan.....	62
5.2.2. Indikator Memberikan Laporan .....	68
5.2.3. Indikator Pertanggungjawaban Pejabat Terpilih.....	74
5.2.4. Indikator Pengendalian.....	82
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>89</b>
4.1. Kesimpulan.....	89
4.2. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional akan terwujud apabila didukung oleh penyelenggaran pemerintahan yang baik dipusat maupun didaerah termasuk di tingkat desa dan kelurahan. Pembangunan yang dilaksanakan di desa atau tingkat kelurahan merupakan realisasi pembangunan Nasional. Untuk menunjang pembangunan di desa peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan.

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah.

Pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan yang terus menerus untuk keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Selain itu, pembangunan dapat diartikan sebagai pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desakarena Kepala Desa yang memegang peran sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab.

Dalam pengelolaan ADD ini dituntut akuntabilitas seorang aparatur dalam pengelolaanya dan perlu menerapkan prinsip good governance yaitu akuntabilitas khususnya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Akuntabilitas adalah

setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat. Sehingga penting bagi pemerintah desa untuk mengimplementasikan akuntabilitas ini pada pengelolaan ADD. Untuk dapat mengelola dan mempertanggung jawabkan penggunaan dana, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa. Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (dalam Permendagri No. 113/2014) dalam Pasal 1 ayat 6 pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam ayat 8 juga dijelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dalam hal akuntabilitas berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga Kepala Desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

Dalam hal akuntabilitas berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga Kepala Desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Pembangunan semenisasi jalan maupun infrastruktur desa yang sepenuhnya tidak berjalan dengan baik tidak hanya dirasakan oleh warga Desa

Perhentian Luas. Tetapi juga di rasakan oleh seluruh warga yang melintasi akses jalan tersebut, seperti masyarakat Desa Rambahan, Desa Logas dan desa-desa lain yang mempunyai urusan ke Kantor Camat Logas Tanah Darat yang bertempat di Desa Perhentian Luas tersebut.

Pembangunan jalan desa yang sepenuhnya tidak berjalan dengan baik tidak hanya dirasakan oleh warga desa Perhentian luas saja, namun juga dirasakan oleh seluruh warga yang ada di Kecamatan Logas Tanah Darat yang menggunakan akses jalan tersebut. Pembangunan yang terkesan asal-asalan di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat kabupaten Kuantan Singingi ini pasalnya baru 2 bulan setelah pengerjaan jalan sudah banyak yang berlobang dan mengelupas dan rusak parah. Hal ini membuat akses warga antar desa tersebut menjadi terhambat.

Sulitnya melalui jalan tersebut akan menghambat kondisi perekonomian masyarakat setempat. Jarak tempuh juga menjadi bertambah karena banyak jalan yang berlubang dan sulit di lalui.

Pembangunan infrastruktur jalan tersebut juga sangat penting agar fasilitas yang ada menunjang dan menjadi jalan yang efisien serta aman bagi masyarakat yang menggunakannya, tidak hanya itu material jalan yang di gunakan untuk membuat sebuah jalan pun harus di perhatikan, karena hal itu merupakan hal yang penting saat pembuatan jalan agar jalan tahan lam dan tidak memakan biaya yang lebih besar. Sturktur yang ada pun harus sangat di perhatikan karena setiap daerah mempunyai kontur tanah yang berbeda jadi kita

harus memperhatikan struktur jalan dan cara pengerjaan jalan tersebut dengan benar, agar berfungsi dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Saat ini masalah infrastruktur jalan menjadi agenda penting untuk dibenahi, karena infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan, diantaranya untuk mencapai target pembangunan ekonomi demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Secara umum pembangunan desa berbentuk pembangunan fisik dan pembangunan non fisik atau mental spiritual. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana, misalnya : jalan, jembatan, gorong – gorong, kebun percontohan, MCK, sarana ibadah, dan lain – lain. Sedangkan pembangunan non fisik berupa pemberian kursus, penyuluhan tentang kesehatan, kewirausahaan, penyuluhan tentang hidup sehat dan lain – lain.

Pembangunan jalan di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat masih banyak jalan yang layak pakai, dan sisanya masih berupa jalan rusak. Kerusakan jalan akan sangat menghambat akses masyarakat terutama perekonomian masyarakat terganggu terlebih lagi pada musim hujan. Sulitnya melalui jalan tersebut akan menghambat kondisi perekonomian masyarakat setempat. Jarak tempuh juga menjadi bertambah karena banyak jalan yang berlubang dan sulit di lalui.

Tabel 1.1 Data Pembangunan Fisik Desa Perhentian Luas

No	Jenis	Tahun	Keterangan
1	Semenisasi jalan desa	2018	Sudah terlaksana
2	Semenisasi jalan desa	2019	Belum terlaksana
3	Bangunan jembatan desa	2019	Sudah terlaksana
4	Bangunan MDA	2019	Sudah terlaksana
5	Bangunan balai desa	2019	Sudah terlaksana

Sumber : Modifikasi Peneliti 2020

Pembangunan desa akan terlaksana dengan baik dengan bantuan dari aparat desa khususnya kepala desa. Kepala desa mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan desa agar pembangunan terlihat merata dan semua rancangan pembangunan terealisasi secara maksimal. Banyak dana yang masih belum terelisasi sesuai rencana. Dengan begitu ada keterlibatan pertanggung jawaban kepala desa untuk mengelola dana desa agar pembangunan fisik terealisasi sesuai rencana. Banyaknya pembangunan desa yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pembangunan yang terlaksana seharusnya didahulukan apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Serta kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat. Dimana aspirasi masyarakat sangat penting untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan sehingga pembangunan takan terwujud dengan tepat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis dilapangan bahwa akuntabilitas kepala desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat masih belum sepenuhnya baik, penulis menemukan beberapa fenomena sebagai berikut diantaranya adalah Tidak adanya plang kegiatan yang terpampang yang bisa dilihat oleh masyarakat. Dalam setiap kegiatan pembangunan, biasanya selalu ada plang penanda pemabngunan sedang dilaksanakan dan juga adanya anggaran yang digunakan, tetapi di Desa Perhentian Luas ada sebagian pembangunan tersebut tidak dipasang plang pembangunannya, sehingga dirasa tidak adanya pertanggung jawaban dari pembangunan tersebut.

Selanjutnya adalah banyak keluhan masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur jalan, Kurang baiknya sektor jalan membuat sulitnya akses membawa hasil perkebunan melalui jalan semenisasi. Selain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat setempat, masih adanya pemborong yang mengerjakan pembungan tersebut dengan asal-asalan, sehingga pembangunannya juga kurang baik dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat.

Masalah terpenting yang dapat penulis ambil dari fenomena tersebut, berdasarkan hasil observasi dilapangan, kurangnya pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala desa dalam pelaksanaan setiap pembangunan tersebut, sehingga dapat diduga bahwa kepala desa masih kurang bertanggung jawab terutama kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Pembangunan desa akan terlaksana dengan baik dengan bantuan dari aparat desa khususnya kepala desa. Kepala desa mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan desa agar pembangunan terlihat merata dan semua rancangan pembangunan terealisasi secara maksimal. Banyak dana yang masih belum terelisasi sesuai rencana. Dengan begitu ada keterlibatan pertanggung jawaban kepala desa untuk mengelola dana desa agar pembangunan fisik terealisasi sesuai rencana. Banyaknya pembangunan desa yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pembangunan yang terlaksana seharusnya didahulukan apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Serta kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat. Dimana aspirasi masyarakat

sangat penting untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan sehingga pembangunan takan terwujud dengan tepat.

Berdasarkan permasalahan diatas yang menjelaskan permasalahan mengenai kurangnya akuntabilitas kepala desa, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana akuntabilitas kepala desa dalam pembangunan. untuk itu peneliti mengambil judul penelitian: **“Akuntabilitas Kepala Desa Dalam pelaksanaan Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas makarumusan masalah yang ada adalah :

**“Bagaimana Akuntabilitas Kepala Desa Dalam pelaksanaan Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”?**

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Aspek Teoritis**

Menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama mengenai Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dan dapat digunakan sebagai referensi

untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang dan memberikan kontribusi dalam pengembangan.

#### **1.4.2 Aspek praktis**

**1.4.2.1** Menambah wawasan keilmuan dalam hal yang berkaitan Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan.

**1.4.2.2** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang baik pada Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat itu sendiri khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas kepala desa.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara**

Administrasi adalah satu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Max Webber dalam Kumorotomo dengan bukunya “Etika Administrasi Negara” (2005:82) Administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Otoritas disini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui negara. Iagin dalam “Filafat Administrasi” (2006:2) Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, dan memenuhi”. Di Indonesia disebut Administrasi dari dua bahasa yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. Yaitu, yang pertama *administratie* dari bahasa Belanda, yang berarti tata usaha dalam arti sempit. Kemudian secara istilah, yaitu manajemen akan kegiatan-kegiatan organisasi. Yang kedua *administration* yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu proses kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dengan demikian ada beberapa hal yang terandung dari pengertian administrasi, yaitu, sekelompok orang, kegiatan, kerja sama, tujuan, dan efisien.

Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda, “administratie” yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ketik mengetik, komputerisasi, surat menyurat (korespondensi), kearsipan, agenda (pekerjaan–Pekerjaan Tata Usaha kantor) Kata administrasi lainnya berasal dari bahasa Yunani, “Ad ministrare” yang artinya Ad =pada, ministrare=melayani, maka Kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Dari dua pengertian di atas secara gamblang dapat diartikan bahwa Administrasi mempunyai pengertian : “pelayanan kegiatan tata usaha kantor”(pelayanan pengetikan/komputer, pelayanan surat menyurat, dan lain sebagainya).

Menurut Dimock (dalam Anggara, 2012:134) mengemukakan definisi Administrasi negara sebagai berikut :Administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakan, dan dikemudikan.

Menurut John M. Pffifner dan Robert V. Presthus (dalam Syafiie, 2009:31), Administrasi Negara yaitu: Administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Secara ringkas, administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-

kebijaksanaan pemerintah, pengarahan, kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Menurut Siagian (2008:7) mengatakan bahwa: “ Administrasi Negara merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Konsep Siagian tentang administrasi Negara, yaitu sebagai keseluruhan kegiatan aparatur pemerintah.

Edward H. Litchfield *Notes on A General Theory of Administration*, yang dikutip dan diterjemahkan oleh Inu Kencana dalam bukunya Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: “Administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasi, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

Prajudi Atmosudirdjo, dalam bukunya Hukum Administrasi Negara memberikan definisi administrasi negara, bahwa Administrasi Negara mempunyai 3 (tiga) arti yaitu Pertama Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan). Yang kedua Administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional.

Menurut Sondang P. Siagian ,Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu .

Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha (2008:36-38), sebagai berikut :

- a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*).

Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara ataupun orang asing.

- b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan.

Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.

- c. Administrasi negara mempunyai prioritas.

Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.

- d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas.

Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.

- e. Pimpinan atasnya (top management) bersifat politis.

Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur.

Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.

- g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara.

Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

Menurut William H. Newman (dalam Silalahi, 2009:21) administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu bergubungan dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas.

Fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (planning).

2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (organizing).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (staffing).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (directing).
5. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (controlling)

### **2.1.2 Teori/Konsep Pemerintahan Desa**

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa.

Mendiskusikan kembali masalah desa sebagai unit pemerintahan mengantarkan pada pemahaman klasik tentang desa, sebagaimana anggapan para sosiolog yang menganggap desa sebagai daerah pedesaan (rural) maupun sebagai lingkungan masyarakat (community). Para ahli sejarah memandang desa sebagai sumber kekuatan dan ketahanan desa dalam mempertahankan kemerdekaan (community power). Bahkan menurut Ndara (dalam Widjaja, 2013:3) desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti kegotongroyongan, musyawarah, mufakat dan kekeluargaan sehingga menimbulkan berbagai semboyan. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. Desa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan Desa sebagai berikut . “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”Pemerintah desa berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, sehingga Pemerintah Desa memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Sebab otonomi yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa diartikan sebagai: “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaran Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati.(Widjaja, 2013: 9) Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014)

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

### **2.1.3 Teori/Konsep Organisasi**

Organisasi merupakan manifestasi solidaritas mekanik, yaitu bahwa organisasi didasarkan atas persamaan, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan dalam memajukan institusi, kemampuan partisipasi aktif sehingga memungkinkan dan terbuka jalan kearah perluasan keahlian serta keterampilan. Setiap karyawan mampu menguasai bidang-bidang tugas atau pekerjaan lain yang bertujuan membantu karyawan bila terjadi pemutusan hubungan kerja atau tiba masa pensiun atau pengurangan tenaga kerja atau dorongan untuk diversifikasi usaha-usaha lain melalui pendidikan dan pelatihan.

Sondang P.Siagian, Organisasi sebagai konkretisasi dari abstraksi administrasi atau dalam bahasa lain sebagai perwujudan dari administrasi. Organisasi sifatnya parsial dalam ketunggalan diartikan bahwa bagian-bagian (parsial) disatukan (menyatu) menjadi satu yang utuh. Keutuhan terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama terdiri dari manusia/tenaga, biaya, waktu, materi/bahan/alat, sasaran dan tujuan sedangkan yang kedua terdiri dari proses, program, rencana, proyeksi, prediksi, alternatif, solusi, pertimbangan, keputusan, mutu, dan evaluasi. Organisasi merupakan wujud conscience collective yang termanifestasikan dalam bentuk setia kawan. Bahwa dalam suatu instansi bentuk setia kawan harus dimunculkan-aktifkan melalui keragaman cara berfikir, kompromitas positif, kerja sama berdasarkan kesatuan pendapat, inisiatif sebagai landasan kedepan, merasa memiliki didalam tanggung jawab bersama, menghindari protes dalam sikap keterbukaan, menjaga nama baik institusi dengan cara menampung dan menerima segala bentuk saran dan pendapat, mengolah,

memecahkan berbagai permasalahan yang diperkirakan akan timbul mencegah curiga-mencurigai dan seterusnya.

Menurut Dimock Organisasi adalah perpaduan secara sistematis bagian-bagian yang saling bergantung atau berkaitan untuk membentuk suatu keesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Robbins, S.P. Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerja sama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Dr. Sondang P. Siagian Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yg didalamnya terdapat seorang taua beberapa yg disebut bawahan.

Menurut Koontz dan O'Donnel Organisasi adalah pembinaan hubungan wewenang dan dimaksudkan untuk mencapai koordinasi yang terstruktur, baik secara vertikal, maupun secara horizontal di antara posisi-posisi yang telah disertai tugas-tugas khusus yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi organisasi adalah hubungan struktural yang mengikat perusahaan dan kerangka dasar tempat individu-individu berusaha, dikoordinasi.

Marc dan Simon Organisasi adalah sistem yang kompleks yang terdiri dari psikologis, sosiologis, teknologis dan ekonomis yang dalam dirinya sendiri membutuhkan penyelidikan yang intensif.

Menurut David Jaffe Organisasi adalah unit sosial atau entitas sosial yang didirikan oleh manusia untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan sekelompok manusia minimal dua orang, mempunyai kegiatan yang terkoordinir, teratur dan terstruktur, didirikan untuk mencapai tujuan tertentu dan mempunyai identitas diri yang membedakan satu entitas dengan entitas lainnya.

#### **2.1.4 Teori/Konsep Pembangunan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju sejahtera, dan berkeadilan.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi. Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat di harapkan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya sebuah pendampingan. Karena pendampingan ini bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah Dana Desa, tetapi yang dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa.

Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan;
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Menurut raharjo pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu:

1. Pembangunan desa jangka panjang

Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional

2. Pembangunan desa jangka pendek.

Tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Pemerintah Desa dapat menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya sebagai pemerintah desa, namun harus tetap mengacu pada perencanaan pembangunan yang sudah di buat di tingkat Kabupaten/Kota. Pada perencanaan dan pelaksanaan sebuah pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pihak-pihak yang lebih kompeten dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknisnya ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk

mengkoordinasikan program pembangunan desanya, Kepala Desa ini didampingi oleh seorang pendamping profesional. Sedangkan Camat akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya sendiri.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjenjang meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan.
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

Menurut Bintoro Tjokromidjojo(2011:223-225) ciri-ciri pembangunan partisipatif adalah :

1. Terlibatnya dan ikut sertanya masyarakat sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara, turut menentukan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Meningkatnya kemampuan untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi, dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang terencana.

Menurut Parwoto (2014:103) ciri-ciri pembangunan yang partisipatif adalah:

1. Proaktif atau sukarela (tanpa disuruh).
2. Adanya kesepakatan yang diambil bersama oleh semua pihak yang terlibat.
3. Adanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut.
4. Adanya pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsur/pihak yang terlibat.

Pembangunan Non Partisipatif, Menurut Kartasmita (2013:19)

pembangunan non partisipatif dapat terjadi sebab:

1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak.
2. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat, tetapi banyak yang kurang memahami maksud itu.
3. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan.
4. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahami, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut.

Menurut Conyers (2011:154) menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Kepercayaan semacam ini adalah penting khususnya bila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat.
4. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan mereka pun mempunyai hak untuk turut (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan non partisipatif adalah pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam hal ini keputusan yang dimaksud adalah keputusan dalam menentukan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa. Tidak adanya partisipasi atau peran serta dari masyarakat, maka program-program pembangunan yang akan dijalankan tidak dapat terealisasi dengan baik. Sehingga dalam desa tersebut tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik.

### **2.1.5 Teori/Konsep Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar *good government* yang merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang di berikan.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20).

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), kemampuan memberikan jawaban (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai ketidak bebasan (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

Akuntabilitas biasanya hanya dikenal di negara yang memiliki konsep demokrasi yang menganggap rakyat sebagai faktor yang sangat penting. Akuntabilitas menerapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan pemerintahan harus di pertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu Negara.

Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat sesungguhnya.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Menurut walther R. Akuntabilitas (dalam Nugroho, 2014:56) adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas dalam arti luas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan akuntabilitas juga merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. (Abdul halim, 2012:20).

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat. Akuntabilitas berkaitan erat dengan kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Selain itu akuntabilitas merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau bisa dikatakan good governance. Akuntabilitas juga dapat menjadi sarana tolak ukur untuk mengetahui suatu pemimpin bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab.

Menyatakan dalam penyelenggaraan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Bintaro Tjokroamidjojo (2011:45) salah satu tokoh yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip lingkungan pertanggungjawaban dimana prinsip ini mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proposional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Prinsip prioritas yakni bahwa laporan akuntabilitas kinerja harus berisi hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjut.
- c. Prinsip manfaat yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja. Akuntabilitas yang dapat berjalan dengan baik apabila prinsip akuntabilitas dijalankan dan diterapkan di instansi pemerintahan.

Akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia meliputi akuntabilitas intern seseorang dan akuntabilitas ekstern seseorang (Saleh dan Iqbal, 2013:45)

- a. Akuntabilitas intern disebut juga akuntabilitas spritual. Tidak sekedar tidak ada pencurian dan sensibilitas lingkungan, tapi lebih dari itu seperti adanya perasaan malu berbuat melanggar ketentuan dan lain-lain. Ini sangat besar maknanya bila semua orang memiliki sensibilitas spritual seperti ini, alasan-alasan permisif seperti berbedanya kemampuan, tidak cukup waktu, tidak cukup sumber daya dan sebagainya merupakan cikal bakal adanya korupsi dan akuntabilitas menjadi seperti kaca mobil berembun alias kabur. Hendaknya kita berusaha keras menghindari keluhan-keluhan semacam itu bila kita ingin melaksanakan akuntabilitas dengan sungguh-sungguh.
- b. Akuntabilitas ekstern seseorang adalah akuntabilitas kepada lingkungan formal (atasan) maupun informal (masyarakat). Akuntabilitas ekstern lebih mudah diukur karena norma dan standarnya jelas. Ada atasan, ada pengawas, ada kawan sekerja yang membantu, ada masyarakat konsumen yang sesekali menyoroti dan memberikan oreksi serta saran perbaikan, kelompok mahasiswa yang sensitif terhadap penyimpangan-penyimpangan, dan ada pula lembaga masyarakat penyeimbang yang kepeduliannya sangat tinggi seperti *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, dan Yayasan Lembaga

Konsumen Indonesia. Polidano (2010:48) menawarkan kategorisasi baru yang disebutnya sebagai akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggung jawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggung jawaban vertikal melalui rantai komando tertentu.

Polidano (2010:78) lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas, yaitu:

- a) Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku para birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing).
- b) Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seseorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru (new public management). Hal ini

mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru.

- c) Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsmen, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti media massa dan kelompok penekan.

Akuntabilitas yang dilakukan pada sektor publik terdiri dari berbagai dimensi. Ellwood (2013:371) mengemukakan empat dimensi akuntabilitas publik berikut ini :

- a. Akuntabilitas kejujuran hukum Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan wewenang sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya yang dipersyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.
- b. Akuntabilitas proses Akuntabilitas proses berkaitan dengan masalah prosedur yang digunakan dalam tugas. Sudahkah memenuhi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi? Akuntabilitas proses dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah. Akuntabilitas proses berkaitan dengan metode dan prosedur operasi dari suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi output.

Akuntabilitas proses menekankan bahwa beberapa tujuan mungkin tidak dapat diukur dan diganti secara langsung tetapi menyajikan bagaimana kegiatan diarahkan pada pencapaian tujuan.

- c. Akuntabilitas program, Akuntabilitas program berkaitan dengan masalah pencapaian tujuan (efektivitas) dan mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas program berkaitan dengan unit-unit dan birokrat secara individual yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai efektivitas program.
- d. Akuntabilitas kebijakan Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut penulis, akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok.

### **2.1.6 Konsep/Konsep Kepala Desa**

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat.

Kepala desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal. (Widjaja, 2013:32) Adapun kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 2) :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- h. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- l. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- m. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berhak (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 3) :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa

- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berkewajiban (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 4) :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik

- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

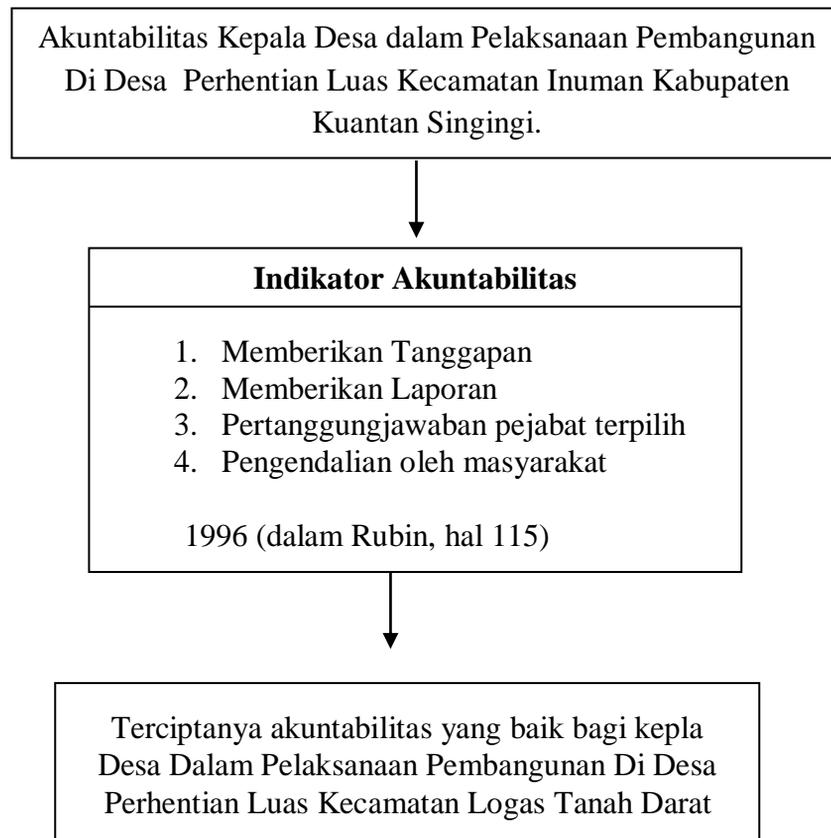
Dulu Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, sekarang Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD sedangkan kepada Bupati, Kepala Desa hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya

Pemerintah desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahdesa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa atau disebut dengan nama lain danperangkat desa. Penjelasan Pasal 95 Ayat 1 ini menyebutkan bahwa istilahKepala Desa dapat Disesuaikan dengan kondisi sosial budaya desasetempat.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Kerangka Berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan. Berikut kerangka pemikiran mengenai Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

**Gambar II.1 Kerangka pemikiran**



**Sumber : Modifikasi peneliti 2020**

### **2.3 Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Diduga kurangnya Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

### **2.4 Defenisi Operasional**

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini.

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan indikator:

#### **2.4.1 Memberikan Tanggapan**

Maksudnya adalah setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan yang menggunakan dana desa di tempat tersebut harus memberikan tanggapan kepada otoritas yang lebih tinggi.

#### **2.4.2 Memberikan Laporan**

Maksudnya adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibuat dengan menggunakanj dana desa haruslah memberikan laporan kepada publik atau masyarakat.

#### **2.4.3 Pertanggung jawaban pejabat terpilih**

Melaporkan adalahmenyampaikan/memberitahu apa yang telah dilakukan atau terjadi sesuatu masalah, dalam hal ini pembangunan semenisasi tapi dengan kualitas yang buruk, yang membuat jalan cepat rusak.

#### **2.4.4 Pengendalian oleh masyarakat**

Dalam hal pembangunan fisik tersebut yang dibuat dengan menggunakan dana desa tersebut haruslah dikendalikan langsung oleh masyarakat untuk mengawasi pembangunan tersebut.

### **2.5 Konsep Operasional**

Tabel 2.1 : Konsep Variabel Tentang Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

<b>Judul</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>	<b>Ukuran</b>
Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.	1. Memberikan Tanggapan	- Pertanggungjawaban - Masalah yang ada	Baik Belum Baik Kurang Baik
	2. Memberikan Laporan	- Rician pembangunan - Rician biaya - Rincian waktu	Baik Belum Baik Kurang Baik
	3. Pertanggung jawaban pejabat terpilih	- Pelaporan Yang telah dilakukan - Pelaporan saat terjadi sesuatu masalah	Baik Belum Baik Kurang Baik
	4. Pengendalian	- Pengendalian oleh masyarakat - Pengawasan oleh masyarakat	Baik Belum Baik Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2020

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian survey dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor dalam Moleong (2010) berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, cacatan di lapangan, foto, atau dokumen pribadi.

#### **3.2 Informan**

Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Menurut Andi, 2010:132 menjelaskan bahwa, informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

Teknik penarikan Informan untuk Tokoh masyarakat penulis menggunakan teknik Simple random sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang paling sederhana (simpl). Sampel diambil secara acak, tanpa memperhatikan tingkatan kelas, usia dan jenis kelamin.

**Tabel III.1 Informan**

<b>No</b>	<b>Unsur</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>Persentase</b>
1	Kepala Desa	1	4,7%
2	Perangkat Desa	8	38%
3	BPD	7	33,3%
4	Masyarakat	5	23,8%
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>100%</b>

Sumber: Modifikasi Peneliti 2019

### **3.3 Sumber Data**

#### **3.3.1 Data Primer**

Data Primer adalah data pokok atau data yang diperoleh langsung dari responden, data yang dibutuhkan adalah data tentang Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

#### **3.3.2 Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh sebagai data pendukung dalam penelitian ini, data ini didapat atau diketahui dari Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

### **3.4. Fokus Penelitian**

Menurut Moleong (2007,17) dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Akuntabilitas Kepala Desa

Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

### **3.5. Lokasi Penelitian**

Menurut Moleong (2007) mendefinisikan lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Yang menjadi Lokasi penelitian ini adalah Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan alamat jalan lintas Pangean-Trans PTPT Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Riau.

### **3.6. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **3.6.1 Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Seperti diungkap Easterberg (dalam Sugiyono,2011:15) wawancara yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan yang

dianggap sebagai informan kunci. Lincoln dan Guba (dalam Basrowi, 2008:127) mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak.

### 3.6.2 Dokumentasi

Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2011) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

### 3.6.3 Observasi

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis pada obyek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Nasution dalam kutipan Sugiyono (2011) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

### 3.6.4 Triangulasi

Menurut Moleong (2007) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya. Menurut Denzin dalam Moleong (2007) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan yaitu, triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. Adapun triangulasi yang peneliti gunakan yaitu triangulasi sumber.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Menurut Bodgan & Biklen dalam Moleong (2007) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sementara itu menurut Sugiyono dalam sugiyono (2011) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

#### **3.7.1 Reduksi Data (*reduction data*).**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul

dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Data yang sudah diperoleh dipilah-pilah dan dirangkum untuk kemudian dicocokkan kembali dengan fokus penelitian ini.

### 3.7.2 Penyajian Data (*Data Display*).

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar. Semua itu dirancang guna mengumpulkan informasi yang tersusun dan mudah dipahami.

### 3.7.3 Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan. Penarikan kesimpulan juga





## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1 Sejarah Desa Perhentian Luas**

Pada zaman dahulu desa Perhentian Luas atau Desa *Taloe* yang sering disebut oleh masyarakat setempat. Dinamakan Desa Perhentian Luas karena desa ini adalah tempat pemberhentian setiap orang yang ingin melakukan perjalanan baik itu perjalan pergi berbelanja, berdagang, berobat maupun kegiatan masyarakat yang lainnya. Desa Perhentian Luas adalah tempat pemberhentian orang yang mau berdagang maupun bertani menuju desa pedalaman. yang lainnya seperti Desa Logas, Lubuk Kebun, Situgal, Sungai Rambai, Teratak Rendah, Rambahan dan Sikijang. Dahulu desa pedalaman tidak bisa ditempuh dengan transportasi sepeda motor atau transpotasi lainnya karena keadaan jalan yang tidak bagus. Jalan menuju desa tersebut hanya jalan setapak yang berlumpur maka harus ditempuh dengan berjalan kaki dan memakan waktu lama untuk menempuhnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 16 Tahun 2002 tanggal 12 Juli 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Logas Tanah Darat maka Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi ibukota Kecamatan.

Adapun batas-batas wilayah Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sako Kecamatan Pangean

2. Sebelah selatan berbatas dengan Desa Dusun Remaja Desa Pasarbaru Kecamatan Pangean
3. Sebelah barat berbatas dengan Desa Teratak Rendah Dan Logas Kecamatan Logas Tanah Darat
4. Sebelah timur berbatas dengan Kecamatan Kuantan Hilir

Desa Perhentian Luas terdiri dari 4 (empat) dusun terdiri Ulak, Pasar, Tangian dan Tamatang. Topografi Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat merupakan daerah daratan yang bergelombang dengan sedikit bebukitan yang sebagian besarnya merupakan areal perkebunan terutama perkebunan sawit dan karet. Jenis tanah yang ada di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat adalah berwarna kuning dengan tingkat keasaman antara 4,5 sampai dengan 5,5.

Desa Perhentian Luas pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6 derajat celcius – 36,5 derajat celcius dan suhu udara minimum berkisar anantara 19,2 derajat celcius sampai dengan 22,0 derajat celcius. Curah hujan antara 229,00 - 1.133.00 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar: musim hujan jatuh pada bulan September-Februari dan musim kemarau jatuh pada bulan Maret-Agustus. Akan tetapi akhir-akhir ini pergantian dan siklus musim sebagaimana tersebut di atas semakin tidak menentu seiring dengan semakin rusaknya ekosistem secara global.

Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat dihuni berbagai suku, diantaranya adalah Suku Melayu, Suku Mandahiling, Suku Peliang (terbagi pula menjadi 2 yaitu Peliang *Lowe* dan Peliang *Soni*). Desa Perhentian Luas ini

juga ada sebagian kecil Suku pendatang seperti: Jawa, Minang, Batak dan Suku kecil lainnya. Penduduk Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat berjumlah 2247 jiwa. Dari 2247 jiwa tersebut 1122 jiwa kaum laki-laki dan 1125 jiwa kaum perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan penduduk Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-Laki	1122
2	Perempuan	1125
<b>Jumlah</b>		<b>2247</b>

*Sumber data: Kantor Kepala Desa Perhentian Luas tahun 2020*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hanya selisih 3 (tiga) orang saja. Laki-laki yang berjumlah 1122 sedangkan perempuan berjumlah 1125 jiwa. Kemudian kalau dilihat pula keadaan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur adalah seperti yang terdapat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.2**  
**Klasifikasi penduduk menurut kelompok umur**

No	Kelompok Umur	Jumlah (Jiwa)
1	Umur 0-4 Tahun	236
2	Umur 6-12 Tahun	224
3	Umur 13-16 Tahun	248
4	Umur 17-19 Tahun	259
5	Umur 20-25 Tahun	302
6	Umur 26-39 Tahun	375
7	Umur 40-55 Tahun	421
8	Umur 56 Tahun keatas	182
<b>Jumlah</b>		<b>2.247</b>

*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Perhentian Luas tahun 2020*

Dari tabel di atas diketahui bahwa masyarakat Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat yang berumur 4 tahun berjumlah 236 jiwa, yang

berumur 6 samapi 12 tahun berjumlah 224 jiwa, yang berumur 13 sampai 16 tahun berjumlah 248 jiwa, yang berumur 17 sampai 19 tahun berjumlah 259 jiwa, yang berumur 20 sampai 25 tahun berjumlah 302 jiwa, yang berumur 26 sampai 39 tahun berjumlah 375 jiwa, yang berumur 40 sampai 55 tahun berjumlah 421 jiwa, yang berumur diatas 56 tahun berjumlah 182. Dari jumlah keseluruhan yang paling banyak adalah yang berumur antara 40-55 tahun.

#### **4.2 Agama dan Pendidikan**

Masyarakat Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi keseluruhannya menganut agama Islam, tanpa ada masyarakat yang menganut Agama di luar Agama Islam. Agama Islam merupakan suatu sistem nilai yang diyakini dan dijadikan pedoman hidup mereka. Mereka menjadikan Agama Islam sebagai nilai yang paling tinggi. Jika dilihat dari segi sarana ibadah menjadi pusat pembinaan kehidupan beragama umat Islam di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat dapat dikatakan cukup memadai.

**Tabel 4. 3**  
**Jumlah sarana ibadah**  
**No Nama Dusun Masjid Mushalla Gereja**

<b>No</b>	<b>Dusun</b>	<b>Masjid</b>	<b>Mushallah</b>	<b>Gereja</b>
1	Dusun I Ulak	1	2	-
2	Dusun II Pasar	1	2	-
3	Dusun III Tangian	1	2	-
4	Dusun IV Tamatang	1	4	-
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>10</b>	-

*Sumber Data : Kantor Kepala Desa Perhentian Luas tahun 2020*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat terdapat 4 (empat) buah Masjid dan 10 (sepuluh)

buah mushalla. Dari ke empat masjid tersebut masing-masing terletak di Dusun I Ulak, Dusun II Pasar, Dusun III Tangian dan Dusun IV tamatang. Sedangkan untuk Mushalla yang berjumlah 10 (sepuluh) buah yang terdapat di Desa Perhentian Luas masing-masing Mushalla terdapat di Dusun I Ulak berjumlah 2(dua) buah Mushalla, Dusun II Pasar berjumlah 2(dua) buah Mushalla, Dusun III Tangian berjumlah 4(empat) buah Mushalla. Sedangkan untuk gereja tidak ada sama sekali. Adapun jumlah keseluruhan sarana ibadah yang ada di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat berjumlah 14 buah.

Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat berjarak lebih kurang 32 kilometer dari ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi. Namun perkembangan dalam bidang pendidikan tergolong pesat, walaupun tidak sepesat yang ada di Kota, hal ini terlihat pada tabel berikut.

## **JUMLAH SARANA PENDIDIKAN**

**Tabel 4.4 Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Perhentian Luas**

<b>NO</b>	<b>SARAN PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	PAUD/Playgrup	1
2	Taman Kanak-Kanak	2
3	Sekolah Dasar	2
4	Madrasah Ibtidaiyah	0
5	Madrasah Diniyah Awaliah	2
6	Sekolah Menengah Pertama	1
7	Madrasah Tsnowiyah	1
8	SLTA	1
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>

*Sumber Data : Kantor Kepala Desa Perhentian Luas tahun 2020*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan sudah terpenuhi untuk setiap tingkatan. Misalnya di Desa Perhentian Luas Kecamatan

Logas Tanah Darat sudah terdapat 10 (sepuluh) sarana pendidikan yaitu tingkat PAUD, TK, SD, MDA, SMP/MTS, dan SMK.

#### **4.3 . Pemerintahan**

Pemerintahan Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, tidak jauh berbeda dengan desa-desa lainnya. Dalam struktur perangkat Desa, Pemerintah Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang ditunjuk melalui proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) langsung dengan sistem Demokrasi dan mengutamakan putra terbaik dari Desa dan memahami tentang Pemerintahan Desa. Pelaksanaan kegiatan administrasi Pemerintahan Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, seorang Kepala Desa, seorang Sekretaris Desa (Sekdes), beberapa orang Kepala Urusan (Kaur) dan beberapa orang Kepala Dusun (Kadus). Kepala Desa merupakan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan Desa dan dilakukan pengawasan oleh legislatif Desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### **Tabel 4.5**

##### **Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Perhentian Luas**

Adapun urain tugas dari perangkat Desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa mempunyai tugas dalam mengkoordinir semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa dan pembangunan Desa. Kepala Desa dalam melakukan pekerjaannya bertanggungjawab kepada camat.

2. Sekretaris Desa merupakan wakil dari Kepala Desa yang bertugas dalam membantu kerja Kepala Desa dalam administrasi Pemerintahan Desa.
3. Kaur Urusan (Kaur) Umum adalah membantu kepala Desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat.
4. Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada Desa dan mempunyai tugas pokok dalam urusan administrasi bidang pemerintahan.
5. Kepala Urusan (Kaur) pembangunan yang bertanggungjawab langsung kepada Desa dan mempunyai tugas pokok dalam urusan pembangunan Desa
6. Badan permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga tinggi Desa yang mempunyai tugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah Desa dan melakukan kerja sama dengan Kepala Desa dalam urusan pembangunan Desa.
7. Kepala Dusun (Kadus) merupakan wakil dari Kepala Desa Setiap dusun yang ada. Kepala dusun bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa dalam urusan pemerintahan dan pembangunan pada tingkat dusun masing-masing.

#### **4.4 . Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat**

Mata pencarian utama masyarakat Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi adalah menjadi petani. Jenis usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi adalah jenis usaha tani karet dan kelapa sawit, karena topografi tanah sangat mendukung usaha tani karet dan kelapa sawit tersebut. Di samping melakukan usaha tani karet dan kelapa sawit,

ada sebagian masyarakat yang melakukan usaha sampingan yakni melakukan usaha perdagangan, peternakan, perikanan dan dompeng. Dompeng adalah mencari emas di sungai.

Potensi pengembangan ekonomi Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi adalah pengembangan usaha perkebunan karet dan perkebunan sawit. Selain dari itu Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki usaha tani sayur-sayuran karena tanahnya sangat subur. Selain dari pengembangan usaha tani, di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi juga cocok dikembangkan sektor perikanan, karena di Desa ini tempatnya sangat strategis. Sekarang sudah banyak masyarakat Desa Perhentian Luas yang mempunyai tambak ikan atau kerambah. Sistem sosial masyarakat desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi sistem dengan menggunakan sistem adat istiadat yang mengatur tata pergaulan sosial dalam masyarakat Desa.

Masyarakat Desa juga memegang tradisi adat seperti dalam acara pelaksanaan upacara adat perkawinan masih dominan dilakukan sampai sekarang. Selain dari upacara perkawinan, masyarakat Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi juga melakukan doa kuburan sekali dalam setahun dengan melakukan makan bersama di kuburan dan memanjatkan doa bersama. Di samping hal tersebut di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ada tradisi yang

agak berbeda dari tradisi desa yang berada di Kecamatan Logas Tanah Darat yang lebih

menonjol adalah *Mamanjek Sialang* (mengambil madu lebah) yang sekaligus merupakan sumber kehidupan masyarakat serta *Manjaring Ruso* (menjerat rusa di hutan). Akan tetapi bukan berarti Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat tidak berpartisipasi dengan budaya Pacu Jalur, setiap tahun digelarnya Pacu Jalur Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat selalu ikut sebagai peserta, apalagi sejak tahun 2010 Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat sudah memiliki jalur sendiri dan sampai saat ini sudah dua buah jalur yang dimiliki yakni Jalur *Dubalang Sakti HarimauPondam* dan *Limo Piako Tuah Nagori* yang belakangan ini juga telah unjuk prestasi di berbagai ajang Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi.

Budaya *mamanjek sialang* biasanya dilakukan 3 (tiga) tahun sekali, budaya *mamanjek sialang* adalah kebiasaan masyarakat memetik hasil madu dari pohon besar atau yang dinamakan oleh masyarakat Desa Perhentian Luas adalah *batang sialang*. Pertama-pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah bermusyawarah untuk menunjuk siapa yang menjadi ketua untuk menuntun kegiatan *mamanjek sialang*, ketua yang ditunjuk biasanya di sebut dengan *pawang sialang* untuk *mamanjek sialang* atau orang yang akan memberikan petunjuk atau tata cara untuk *mamanjek sialang*. Untuk melakukan kegiatan *mamanjek sialang* harus ada izin dari semua kepala suku karena *batang sialang* yang diambil adalah milik suku-suku yang ada di Desa Perhentian Luas bukan milik pribadi. Setelah persiapan selesai maka *mamanjek sialang* dilakukan pada

malam hari karena menurut pawang tersebut madu yang diambil pada malam hari akan berbeda rasa, warna, kekentalan dan manfaatnya akan lebih manjur dari pada madu yang diambil pada siang hari. *Mamanjek sialang* tidak bisa dilakukan hanya satu orang saja paling sedikit ada 10 orang karena *pawang sialang* hanya bekerja untuk memanjat dan menjatuhkan madu. Sedangkan yang memeras dan menyaring dilakukan secara bersama-sama. Setelah pengambilan madu selesai dilakukan maka madu akan ditinggalkan di pohon *sialang* sebagian kecilnya untuk penunggu pohon *sialang* sebagai tanda terima kasih sudah menjaga pohon *sialang* yang disebut dengan datuak *sialang* atau binatang harimau yang dipercayai masyarakat penunggu *sialang*. Maka pohon *sialang* bisa terjaga dari orang-orang nakal yang mau mencurinya untuk keperluan pribadi. Madu yang didapat dari *mamanjek sialang* akan dibagi-bagi dan selebihnya akan dijual. *Manjaring rusa* adalah kegiatan menjaring rusa di hutan dengan menggunakan jaring yang terbuat dari rotan dilakukan sekali dalam satu bulan oleh sekelompok masyarakat. Pertama-pertama yang harus dilakukan adalah bermusyawarah untuk menentukan kapan berangkat untuk melihat jejak rusa. Apabila telah ditemukan jejak rusa maka ditentukan kapan untuk menahan jerat rusa atau *majaring rusa*. Apabila rusa terkena pada jerat maka rusa tersebut akan dijual dagingnya dan sebagiannya akan dijadikan gulai untuk kenduri sebagai rasa syukur. Kemudian kepala rusa akan diberikan kepada orang dikenakan rusa jeratnya sebagai tanda bahwa semakin banyak kepala rusa yang didapatkan maka seiring waktu dia bisa dijadikan untuk kepala kelompok sebagai penuntun *manjaring rusa*. Masyarakat Desa Perhentian Luas berpendapat bahwa menjadi kepala *manjaring rusa* adalah

pangkat yang sangat diagungkan dan menjadi kebanggaan setiap orang. Upacara perkawinan yang biasanya dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu pihak keluarga laki-laki akan datang untuk meminang atau dikenal dengan istilah *maantan tando* yang dikenal dalam masyarakat Desa Perhentian Luas. Keluarga yang datang dari pihak laki-laki adalah orang-orang yang satu suku dengan ayah mempelai laki-laki yang membawa cicin emas adalah syarat yang pertama, peralatan satu badan, baik itu pakaian, alat kosmetik, dan lain-lain.

Maka pihak perempuan akan menunggu dengan hidangan seperti kue. Setelah terjadi pertunangan maka *niniak mamak* akan menetapkan tanggal untuk menikah. Setelah terjadi pernikahan maka diadakan pesta untuk memeriakannya. Seminggu sebelum pesta dilaksanakan maka *niniak mamak* akan bermusyawarah atau membagi kerja untuk terlaksananya pesta pernikahan. Pertama-tama masyarakat yang diundang untuk membantu untuk membuat makanan yang akan dihidangkan menciptakan kerja gotong royong. Setiap masyarakat yang datang ke rumah pesta pernikahan akan diberikan seperti makanan yang akan dibawa pulang tanda terima kasih tuan rumah. Pada hari pesta pihak perempuan akan datang menjemput pihak laki dengan menggunakan pakaian adat yang diantar oleh keluarga perempuan atau disebut *bako* yang diiringi dengan *calempong* sebagai tanda bahagia. Di pertengahan jalan pihak laki-laki dan perempuan akan bertemu dan berjalan menuju rumah pihak perempuan sebagai simbol bahwa pihak laki-laki akan dibawa ke rumah perempuan atau tinggal di rumah perempuan. Di depan rumah perempuan,

*Nianiak mamak* pihak laki-laki dan perempuan akan berbalas pantun yang isinya nasehat dan juga tanda memberitahukan pihak laki-laki tersebut akan tinggal di rumah pihak perempuan tersebut. Setelah itu maka boleh pihak laki-laki tinggal di rumah perempuan. Setelah upacara adat perkawinan selesai maka diadakan pesta perkawinan tanda syukur dan kebahagiaan. Peran adat istiadat dalam masyarakat Desa dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotongroyongan dalam membangun Desa.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Identitas Responden

Setelah diadakan penelitian dan pengumpulan data dilapangan melalui penyebaran daftar wawancara kepada informan yang berjumlah sebanyak 21 orang. Dan didapat gambaran mengenai responden, berikut dideskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia, pekerjaan dan pendidikan.

##### 5.1.1 Identitas informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden didapati jenis kelamin responden sebagai berikut :

Tabel 5.1 : Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	Laki-Laki	15	71,42%
2	Perempuan	6	28,57%
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>100</b>

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

Dari tabel 5.1 diatas pat dilihat jumlah informan sebanyak 21 orang, dimana jumlah informan laki-laki adalah sebanyak 15 orang dengan persentase 71,42%, dan jumlah informan perempuan adalah sebanyak 6 orang dengan persentase 28,57%.

##### 5.1.2 Identitas informan Berdasarkan Tingkat Usia

Tingkat umur informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini:

Tabel 5.2 : Klasifikasi informan Menurut Tingkat Umur

No	Tingkat umur (tahun)	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	< 30	7	33,33 %
2	31 – 40	8	38,09 %
3	41 – 50	4	19,04 %
4	>51	2	9,52 %
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

Dari tabel 5.2 dapat dilihat bahwa jumlah informan yang berumur kecil dari 30 tahun yaitu sebanyak 7 orang (33,33%), antara umur 31-40 tahun yaitu sebanyak 8 orang (38,09%) dan antara umur 41-50 tahun sama-sama sebanyak 4 orang (19,04%), serta umur antara diatas 51 tahun sebanyak 2 orang (9,52%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa informan yang paling banyak yaitu usia 31 – 40 tahun.

### 5.1.3 Identitas informan Berdasarkan Pekerjaan

Adapun informan dalam penelitian ini akan dijelaskan pada tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.3 Klasifikasi informan Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Pegawai	2	9,52%
2	Wiraswasta	5	23,80%
3	Petani	12	57,14%
4	Lainnya	2	9,52%
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pekerjaan informan sebagai pegawai yaitu sebanyak 2 orang (9,52%), wiraswasta sebanyak 5 orang (23,80%), Petani sebanyak 12 orang (57,14%), dan pekerjaan lainnya sebanyak 2 orang (9,52%). Hal ini menunjukkan bahwa informan yang paling banyak adalah yang

bekerja sebagai petani, karena masyarakat mayoritas adalah bekerja sebagai petani.

#### **5.1.4 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Adapun Pendidikan informan dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut ini:

Tabel 5.4 Klasifikasi informan Menurut Tingkat Pendidikan

<b>No</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah Responden (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	SLTP	5	23,80%
2	SLTA	10	47,61%
3	Diploma	3	14,28%
4	Strata I	3	14,28%
5	Strata II	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>100%</b>

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan SLTP sebanyak 5 orang (23,80%), SLTA sebanyak 10 orang (47,61%), Diploma sebanyak 3 orang (14,28%), Strata I sebanyak 3 orang (14,28%), dan Strata II sebanyak 0 orang (0%). Dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan paling banyak ialah yang berpendidikan SLTA.

#### **5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi**

Untuk mengetahui tanggapan Informan terhadap pertanyaan pada setiap indikator Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi yang dipaparkan berikut ini:

## **5.2.1 Indikator Memberikan Tanggapan tentang Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan**

Maksudnya adalah setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan yang menggunakan dana desa di tempat tersebut harus memberikan tanggapan kepada otoritas yang lebih tinggi.

### **5.2.1.1 Pertanggung Jawaban Kepala Desa terhadap masalah yang ada**

Untuk menjawab dan mencari jawaban dari indikator memberikan tanggapan terhadap pertanggung jawaban kepala desa dalam pembangunan di desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti memberikan wawancara secara langsung dengan tiga pertanyaan yang dilontarkan, yang mana pertanyaannya adalah, Bagaiamanakah tanggapan kepala desa terhadap pembangunan di desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat?

Berikut adalah jawaban dari kepala Desa Perhentian Luas bapak Drs. Martunus, MM yang mengatakan:

*“pembangunan didesa sudah dilaksanakan dengan baik dan telah direncanakan sebelumnya serta sepenuhnya semua pembangunan mendapat dukungan dari masyarakat meskipun ada juga kendala dilapangan namun tidak terlalu banyak dan dapat diatasi dengan baik”.*

Berikut adalah jawaban dari perangkat desa perhentian luas yaitu bapak Biyanca Duta Pratama, SIP yang menjabat sebagai sekretaris desa perhentian luas mengatakan:

*“pembangunan didesa perhentian luas berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan perencanaan, namun pembangunan dilaksanakan secara bertahap terutama pembangunan fisik desa”.*

Berikut adalah jawaban dari perangkat desa perhentian luas yaitu bapak Eronizen, SP yang menjabat sebagai Kaur Keuangan desa perhentian luas mengatakan:

*“pembangunan desa sudah dilaksanakan sebagai mana mestinya, dan semua pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia, dan pembangunan fisik menjadi prioritas kita”.*

Selanjutnya adalah tanggapan anggota Badan Permusyawaratan Desa Perhentian Luas terhadap pembangunan desa yaitu bapak Zulkriadi, SE mengatakan:

*“pembangunan desa berjalan dengan baik, meskipun masih banyak rencana pembangunan yang belum terlaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat terutama pembangunan semenisasi jalan desa”.*

Selanjutnya adalah tanggapan dari masyarakat terhadap pembangunan desa perhentian luas yaitu bapak sepka aprito mengatakan:

*“pembangunan desa mungkin sudah baik, namun masih banyak jalan-jalan desa yang masih rusak dan perlu disemenisasi, dan juga pemerintah desa kurang merata dalam pembangunan desa disetiap dusun, semoga besok lebih baik lagi pembangunan desa perhentian luas”.*

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas, dapat dilihat bahwa pembanguan desa di perhentian luas sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan, namun berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan dapat dilihat bahwa pembangunannya memang sudah berjalan sesuai dengan perencanaan, namun perlu peningkatan lagi untuk pembangunannya, tidak hanya pembanguan fisik seperti pembangunan semenisasi saja, tetapi juga pembanguan-pembanguan yang lainnya.

### **5.2.1.2 Pertanggung Jawaban Masalah Akuntabilitas Di Desa Perhentian Luas**

Berikutnya adalah pertanyaan kedua dari indikator pertama tentang pembangunan desa perhentian luas, yang mana pertanyaannya adalah Bagaimanakah respon kepala desa dalam menghadapi permasalahan pembangunan di desa perhentian luas kecamatan logas atanah darat? Untuk mengetahui lebih lanjut hasilnya, bisa kita lihat hasil wawancara dengan informan yang pertama adalah kepala desa.

Berikut adalah jawaban dari kepala Desa Perhentian Luas bapak Drs. Martunus, MM yang mengatakan:

*“Setiap pembangunan pasti ada permasalahan, begitu juga di desa perhentian luas, dalam menghadapi permasalahan seperti itu, kami selaku pemerintah desa selalu mencari solusi terbaik yaitu dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama pihak kecamatan”.*

Berikut adalah jawaban dari perangkat desa perhentian luas yaitu bapak Biyanca Duta Pratama, SIP yang menjabat sebagai sekretaris desa perhentian luas mengatakan:

*“Ya dalam menghadapi setiap permasalahan pembangunan desa, pemerintah selalu memberikan solusi dan berkoordinasi terutama dengan perangkat desa dan juga masyarakat desa”.*

Berikut adalah jawaban dari perangkat desa perhentian luas yaitu bapak Jupriadis yang menjabat sebagai Kaur Umum desa perhentian luas mengatakan:

*“dalam menanggapi permasalahan desa, terutama dalam pembangunan desa, yang pastinya kami selalu berkoordinasi dengan semua pihak untuk mencari solusi terbaik untuk desa”.*

Selanjutnya adalah tanggapan anggota Badan Permusyawaratan Desa Perhentian Luas terhadap pembangunan desa yaitu bapak Sudarmono, S.Pd mengatakan:

*“menghadapi permasalahan adalah sebuah tantangan, tapi dalam menghadapi permasalahan pembangunan desa, saya hanya mengawasi setiap pembangunan, ketika ada permasalahan ya perlu didiskusikan dulu baru dicarikan solusi terbaik untuk pembangunan desa”.*

Selanjutnya adalah tanggapan dari masyarakat terhadap pembangunan desa perhentian luas yaitu bapak Zulkifli mengatakan:

*“kalau masalah pembangunan desa, ya saya rasa sudah berjalan cukup baik, namun kalau untuk permasalahan dan penanganannya saya kurang mengetahui, yang jelas pemerintah desa harus melaksanakan pembangunan desa secara merata dan lebih maksimal lagi”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat diketahui bahwa pemerintah desa dalam hal ini sudah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak untuk mengatasinya. Dengan demikian, berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, pemerintah desa memang sudah melakukan hal apa yang telah mereka katakan, namun masyarakat kurang memahami setiap permasalahan ini dan masyarakat hanya ingin pembangunan lebih merata dan lebih baik lagi kedepannya.

Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga dari indikator pertama, yang mana pertanyaan yang diberikan kepada informan adalah sebagai berikut Bagaimanakah tanggapan kepala desa dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap pembangunan yang ada di desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat? Adapun jawaban yang diberikan oleh informan terhadap pertanyaa

wawancara tersebut adalah yang pertama dari kepala Desa Perhentian Luas bapak

Drs. Martunus, MM yang mengatakan:

*“setiap kegiatan pembangunan didesa perhentian luas selalu saya buat laporan dan memberikan laporan pertanggung jawaban tersebut kepada camat, dan juga laporan setiap pembangunan desa tersebut sudah diketahui oleh seluruh perangkat desa dan ketua serta anggota badan permusyawaratan desa atau BPD”.*

Berikut adalah jawaban dari perangkat desa perhentian luas yaitu bapak Biyanca Duta Pratama, SIP yang menjabat sebagai sekretaris desa perhentian luas mengatakan:

*“kalau pertanggung jawaban kepala desa terhadap pembangunan desa didesa perhentian luas sudah cukup baik, yang mana pembangunan yang dilaksanakan semuanya adalah pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya dan sesuai dengan anggaran dana desa yang ada”.*

Berikut adalah jawaban dari perangkat desa perhentian luas yaitu bapak Sapril yang menjabat sebagai kasi Pemerintahan desa perhentian luas mengatakan:

*“dalam memberikan pertanggung jawaban terkait pembangunan desa perhentian luas, kepala desa sudah melaksanakannya dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari setiap kegiatan pembangunan selalu dibuat laporan pertanggung jawaban dan dilaporkan langsung pihak kecamatan”.*

Selanjutnya adalah tanggapan anggota Badan Permusyawaratan Desa Perhentian Luas terhadap pembangunan desa yaitu bapak Dani Andika, S.Pd mengatakan:

*“pertanggung jawaban kepala desa terhadap pembangunan desa perhaentian luas sudah cukup baik, kepala desa selalu memberikan keterangan setiap kegiatan yang akan dan telah selesai dilaksanakan dan membuat laporan pertanggung jawaban setiap kegiatan pembangunan tersebut”.*

Selanjutnya adalah tanggapan dari masyarakat terhadap pembangunan desa perhentian luas yaitu ibu Sri Gunawati mengatakan:

*“ntah la ya, saya kurang tahu tentang pertanggung jawaban kepala desa terhadap pembangunan desa perhentian luas tersebut, yang jelas menurut saya kalau pembangunannya ada berarti sudah bertanggung jawab, tapi kalau tak ada pembangunan berarti pertanggung jawabannya kurang. Selama ini pembangunan sudah ada walaupun belum semuanya dan belum merata lagi”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua unsur informan, dapat dilihat bahwa dalam memberikan tanggapan pertanggungjawaban kepala desa sudah cukup baik, namun berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, pertanggungjawabannya memang sudah dilaksanakan dengan cukup baik, namun sebaiknya kepala desa dan perangkatnya menyampaikannya kepada masyarakat banyak, agar tidak ada kecurigaan dan kecemburuan sosial antar masyarakat, terutama dalam pelaksanaan pembangunan di desa perhentian luas tersebut.

## **5.2.2 Indikator Memberikan Laporan Pertanggung Jawaban terkait Pembangunan Di Desa Perhentian Luas**

Setiap kegiatan yang dilaksanakan tentu ada bentuk pertanggung jawaban yang harus dilaporkan, terutama kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan uang pemerintah. Begitu juga dengan pembangunan fisik di desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi.

### **5.2.2.1 Memberikan Laporan Rincian Pembangunan**

Yang dimaksud dengan memberikan laporan disini adalah, setiap kegiatan pembangunan harus ada pertanggung jawaban dalam bentuk laporan yang akan disampaikan kepada yang terkait, dan juga disampaikan kepada masyarakat banyak atau publik. Agar dapat kita mengetahui, apakah kepala desa perhentian

luas sudah memberikan laporan setiap kegiatan pembangunan di desa tersebut perlu rasanya saya sebagai peneliti untuk melakukan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan. Adapun pertanyaannya adalah apakah kepala desa selalu terbuka dalam memberikan laporan kegiatan pembangunan di desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi?

Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh kepala desa itu sendiri yakni bapak Drs. Matunus, MM mengatakan bahwa:

*“saya selalu terbuka menyampaikan semua hasil laporan pertanggung jawaban setiap kegiatan pembangunan didesa perhentian luas, keterbukaan laporan pertanggungjawaban yang saya sampaikan sudah dilihat langsung oleh seluruh perangkat desa dan juga seluruh anggota badan permusyawaratan desa serta masyarakat secara umum”.*

Selanjutnya adalah jawaban yang diberikan langsung oleh Sekretaris Desa Perhentian Luas dengan pertanyaan yang sama yaitu bapak Bianca duta Pratama, S.IP adalaha sebagai berikut:

*“kepala desa selalu terbuka dalam menyapaikan hasil laporan setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan selalu disampaikan oleh kepala desa melalui forum rapat-rapat teretntu dalam kegiatan pembangunan tersebut”.*

Selanjutnya adalah tanggapan yang diberikan oleh perangkat desa terkait keterbukaan kepala desa dalam menyampaikan setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan didesa perhentian luas yakni bapak Sudirman yang menjabat sebagai kasi kesejahteraan mengatakan yaitu:

*“kepala desa selalu terbuka terkait informasi kegiatan pelaksanaan pembangunan desa perhentian luas, dan kepala desa juga sering berkoordinasi dengan perangkat desa dalam setiap pelaporan kegiatan pembangunan desa tersebut”.*

Selanjutnya adalah kita lihat tanggapan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa perhentian luas terkait keterbukaan kepala desa dalam menyampaikan laporan kegiatan pembangunan desa yaitu bapak Debi Kristian yang mengatakan:

*“kepala desa sudah cukup terbukalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut, terutama dalam pembuatan pelaporan keuangan desa tersebut dan selalu berkoordinasi dengan semua pihak.”*

Selanjutnya kita lihat juga pendapat dari masyarakat terkait keterbukaan kepala desa dalam memberikan laporan pertanggung jawaban setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perhentian luas yaitu ibu yetmawati yang mengatakan:

*“kepala desa memang sudah agak terbuka dalam menyampaikan dan memberikan laporan setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perhentian luas, setiap rapat desa disampaikan secara langsung, namun tidak semua masyarakat mengetahuinya sebaiknya disosialisasikan dan diinformasikan lebih baik lagi kedepannya.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang pendapat mereka terhadap keterbukaan kepala desa dalam menyampaikan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sudah cukup baik. Berdasarkan hasil analisa peneliti dilapangan, sebaiknya kepala desa menyampaikan lebih terbuka lagi kepada seluruh elemen masyarakat desa perhentian luas agar pembangunan dapat lancar dilaksanakan.

#### **5.2.2.2 Memberikan Laporan Rincian Waktu**

Berikutnya adalah pertanyaan kedua masih dengan indikator keterbukaan memberikan laporan. Untuk mengetahui hasil dari indikator tersebut, maka

peneliti memberikan pertanyaan kepada informan, yang mana pertanyaannya adalah Apakah kepala desa selalu tepat waktu dalam memberikan laporan kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat?

Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh kepala desa itu sendiri yakni bapak Drs. Matunus, MM mengatakan bahwa:

*“waktu saya memberikan laporan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan selalu tetap waktu, laporan disampaikan secara langsung kesemua pihak terkait dan yang memerlukan laporan tersebut”.*

Selanjutnya adalah jawaban yang diberikan langsung oleh Sekretaris Desa Perhentian Luas dengan pertanyaan yang sama yaitu bapak Bianca duta Pratama, S.IP adalah sebagai berikut:

*“kepala desa selalu tepat waktu dalam menyampaikan dan memberikan laporan pelaksanaan pembangunan desa perhentian luas, tidak hanya itu kepala desa juga memberikan keterangan yang baik kepada seluruh perangkat desa sebelum dilaporkan hasil kegiatan pembangunan tersebut”.*

Selanjutnya adalah tanggapan yang diberikan oleh perangkat desa terkait ketepatan waktu kepala desa dalam menyampaikan setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa perhentian luas yakni bapak Can Hendrizal yang menjabat sebagai Kepala Dusun I mengatakan yaitu:

*“kepala desa selalu terbuka dan tepat waktu menyampaikan dan memberikan laporan kegiatan pembangunan desa dan terkait informasi kegiatan pelaksanaan pembangunan desa perhentian luas, dan kepala desa juga sering berkoordinasi dengan perangkat desa dalam setiap pelaporan kegiatan pembangunan desa tersebut”.*

Selanjutnya adalah kita lihat tanggapan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa perhentian luas terkait ketepatan waktu kepala desa

dalam menyampaikan laporan kegiatan pembangunan desa yaitu bapak Heri Irianto yang mengatakan:

*“kepala desa sudah cukup terbukalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut, terutama dalam pembuatan pelaporan keuangan desa tersebut dan selalu berkoordinasi dengan semua pihak dalam pemberian dan penyampaian laporan kegiatan pembangunan desa, kepala desa juga sudah menyampaikannya dengan tepat waktu.”*

Selanjutnya kita lihat juga pendapat dari masyarakat terkait ketepatan waktu kepala desa dalam memberikan laporan pertanggung jawaban setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perhentian luas yaitu ibu kumini yang mengatakan:

*“kalau ketepatan waktu kepala desa dalam menyampaikan informasi pelaksanaan pembangunan desa saya kurang memahaminya, karena waktu yang ditetapkan tersebut saya tak mengetahuinya, yang jelas biasanya kepala desa atau pihak pemerintah desa selalu menyampaikan dan memberikan informasi pembangunan ketika ada rapat-rapat tertentu di desa perhentian luas.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, waktu penyampaian kepala desa dalam memberikan laporan kepada pihak terkait sudah tepat dan sesuai dengan waktu yang ada, namun berdasarkan masyarakat, katanya hanya disampaikan ketika ada rapat desa saja. Berdasarkan hasil observasi dan analisa peneliti, dapat diketahui bahwa kepala desa sudah tepat waktu dalam menyampaikan informasi pelaksanaan pembangunan didesa perhentian luas kecamatan logas tanah darat.

Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga masih dari indikator memberikan laporan. Untuk mengetahui jawaban dari informan terhadap pertanyaan tersebut maka dibutuhkan keterangan jawaban dari informan tersebut. Adapun

pertanyaannya adalah sebagai berikut Bagaimanakah bentuk pelaporan kegiatan kepala desa dalam melaporkan kegiatan pembangunan di desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat?

Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh kepala desa itu sendiri yakni bapak Drs. Matunus, MM mengatakan bahwa:

*“bentuk laporan yang saya sampaikan terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah dalam bentuk tulisan dan lisan, yang mana lisannya adalah telah saya sampaikan kepada anggota bpd dan juga perangkat desa lainnya, sedangkan bentuk tulisan yang saya sampaikan adalah dalam bentuk catatan harian dan bulanan pelaksanaan pembangunan desa di desa perhentian luas”.*

Selanjutnya adalah jawaban yang diberikan langsung oleh Sekretaris Desa Perhentian Luas dengan pertanyaan yang sama yaitu bapak Bianca duta Pratama, S.IP adalah sebagai berikut:

*“kepala desa memebrikan keterangan atau laporan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perhentian luas, yang mana keterangan atau laporan yang disampaikannya adalah catatan pelaksanaan pembangunan kemudian dibuat dalam bentuk buku laporan yang akan disampaikan kepada kecamatan dan juga disampaikan dalam rapat pemerintah desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat”.*

Selanjutnya adalah tanggapan yang diberikan oleh perangkat desa terkait bentuk laporan kepala desa dalam menyampaikan setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan didesa perhentian luas yakni bapak Hendri Mizola yang menjabat sebagai Kepala Dusun II mengatakan yaitu:

*“kepala desa selalu terbuka dan tepat waktu mnyampaikan dan memberikan laporan kegiatan pembangunan desa dan terkait informasi kegiatan pelaksanaan pembangunan desa perhentian luas, dan kepala desa juga sering berkoordinasi dengan perangkat desa dalam setiap pelaporan kegiatan pembangunan desa tersebut. Adapun bentuk laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan adalah dalam bentuk tulisan dan lisan, yang mana*

*kepala desa selalu menyampaikannya dalam kegiatan rapat-rapat desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat”.*

Selanjutnya adalah kita lihat tanggapan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa perhentian luas terkait ketepatan waktu kepala desa dalam menyampaikan laporan kegiatan pembangunan desa yaitu bapak Milus yang mengatakan:

*“kepala desa selalu membuat laporan kegiatan pelaksanaan pembangunan desa perhentian luas, hal ini dapat kami ketahui bahwa setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perhentian luas selalu diketahui oleh anggota bpd dan setiap anggota bpd selalu mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat.”*

Selanjutnya kita lihat juga pendapat dari masyarakat terkait ketepatan waktu kepala desa dalam memberikan laporan pertanggung jawaban setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perhentian luas bapak Sepka Aprito yang mengatakan:

*“kepala desa kata orang-orang telah membuat laporan setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, berarti dalam bentuk laporan tertulis yang telah disahkan oleh semua pihak, tapi jarang laporan kegiatan tersebut ditampilkan dalam bentuk baliho besar, jadi masyarakat kurang mengetahui terhadap laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat.”*

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara peneliti dilapangan, dapat diketahui bahwa untuk bentuk pelaporan kepala desa terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat masih kategori cukup baik. Hal ini masih ditemuinya beberapa kekurangan dalam bentuk pelaporan kepala desa tersebut, yang mana sebaiknya kepala desa membuat baliho besar yang ditampilkan dikantor desa atau ditempat umum, agar masyarakat juga dapat mengetahui setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perhentian luas, serta juga masyarakat mengetahui biaya

yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tersebut dan agar pembangunan lebih baik lagi kedepannya.

### **5.2.3 Pertanggungjawaban Pejabat terpilih Dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Pembangunan Di Desa Perhentian Luas**

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan, tentu ada evaluasi dan pertanggung jawaban dari setiap kegiatan pembangunan tersebut. Baik itu kegiatan yang dilaksanakan secara harian, kegiatan bulanan, dan kegiatan tahunan. Pertanggung jawaban kegiatan ini tentu melibatkan orang yang melaksanakan kegiatan pembangunan yang akan disampaikan kepada pihak terkait atau pihak yang berwenang yang memberikan kepercayaan. Apalagi kegiatan yang menggunakan anggaran atau dana milik pemerintah. Begitu juga dengan kegiatan pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi yang melaksanakan kegiatan pembangunan dengan menggunakan dana pemerintah yaitu dana pemerintah desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi.

#### **5.2.3.1 Pertanggung Jawaban yang telah dilakukan Pejabat Terpilih**

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, kepala desa tentu telah mempercayai kegiatan pembangunan tersebut kepada orang-rang yang telah ditunjuk oleh kepala desa, baik itu melalui forum rapat ataupun melalui mekanisme kebijakan kepala desa perhentian luas itu sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan desa tersebut, orang-orang yang telah ditunjuk tersebut harus memberikan pertanggung jawaban kepada kepala desa dan juga kepada masyarakat banyak agar pembangunan desa lebih terbuka.

Untuk itu, agar dapat kita mengetahui pertanggungjawaban orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa tersebut, maka peneliti

memberikan beberapa pertanyaan kepada informan agar hasilnya lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut  
Apakah pelaksana kegiatan pembangunan telah memberikan laporannya kepada kepala desa dan masyarakat di desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat?

Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh kepala desa itu sendiri yakni bapak Drs. Matunus, MM mengatakan bahwa:

*“para pelaksanak kegiatan pembangunan desa perhentian luas sudah menyampaikan dan memberikan keterangan laporan kegiatan tersebut, baik laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan, yang jelas setiap pembangunan selalu ada laporan pertanggungjawabannya walaupun terkadang ada juga yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan”.*

Selanjutnya adalah jawaban yang diberikan langsung oleh Sekretaris Desa Perhentian Luas dengan pertanyaan yang sama yaitu bapak Bianca duta Pratama, S.IP adalaha sebagai berikut:

*“dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perhentian luas, pelaksana pembangunan desa selalu menyampaikan dan memberikan laporan kegiatan kepada kepala desa, saya selaku sekretaris desa selalu memeriksa laporan yang disampaikan tersebut sebelum dilihat dan disahkan langsung oleh kepala desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi”.*

Selanjutnya adalah tanggapan yang diberikan oleh perangkat desa terkait bentuk laporan pelaksana pembangunan kepada kepala desa dalam menyampaikan setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan didesa perhentian luas yakni bapak Almarsidi yang menjabat sebagai Kepala Dusun III mengatakan yaitu:

*“pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perhentian luas selalu memberikan dan menyampaikan setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan didesa perhentian luas, terkadang saya juga ikut andil dalam*

*pelaksanaan pembangunan tersebut dan saya selalu membuat laporan kegiatan pembangunan desa perhentian luas tersebut, namun terkadang laporan yang saya sampaikan juga agak terlambat dari waktu yang telah ditentukan, tapi hal itu tidak terlalu menjadi permasalahan untuk pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi”.*

Selanjutnya adalah kita lihat tanggapan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa perhentian luas terkait laporan kegiatan pelaksana kepada kepala desa dalam menyampaikan laporan kegiatan pembangunan desa yaitu Ibu Vivi Susanti, S.Psi yang mengatakan:

*“ya kami juga terkadang sebagai pelaksana pembangunan desa perhentian luas, apabila untuk pelaksanaan pembangunan desa tersebut diamanahkan kepada kami, maka kami selalu menyampaikan laporan kepada kepala desa dan juga ketua bpd, lagipun kami sebagai bpd selain mengawasi pembanguna, kami juga ikut turun tangan dalam pelaksanaan pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi tersebut..”*

Selanjutnya kita lihat juga pendapat dari masyarakat terkait pelaporan kegiatan pelaksana kepada kepala desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perhentian luas bapak Sepka Arianto yang mengatakan:

*“kalau masalah laporan pelaksana kepada kepala desa kami kurang mengeathui, karena masyarakat memang banyak yang dilibatkan dalam setiap pelaksanaan pembangunan desa perhentian luas, tetapi masyarakat hanya sebagai pekerja saja, yang mengetahui dan membuat laporan tersebut biasanya perangkat desa atau anggota bpd.”*

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang didasari dengan hasil wawancara peneliti dengan informan, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pejabat terpilih sudah berjalan cukup baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan, tetapi hal itu tidak berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi.

### 5.2.3.2 Pelapor Pertanggung Jawaban saat terjadi suatu Masalah

Selanjutnya adalah pertanyaan kedua masih dengan indikator pertanggungjawaban pejabat terpilih, yang mana pertanyaannya adalah sebagai berikut Apakah ada papan plang informasi dalam setiap kegiatan pembangunan di desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat?

Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh kepala desa itu sendiri yakni bapak Drs. Matunus, MM mengatakan bahwa:

*“biasanya pelaksana pembangunan selalu menyampaikan informasi pelaksanaan pembangunan didesa perhentian luas kecamatan logas tanah darat, baik itu pelaksana perorangan ataupun badan pengelola, selalu memberikan informasi melalui media sosial terkait biaya ataupun waktu pelaksanaan pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi”.*

Selanjutnya adalah jawaban yang diberikan langsung oleh Sekretaris Desa Perhentian Luas dengan pertanyaan yang sama yaitu bapak Bianca duta Pratama, S.IP adalah sebagai berikut:

*“terkadang kami dari pemerintah desa meninjau secara langsung pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat, ada juga para pelaksana lupa memasang papan informasi dan ada juga pelaksananya terlambat dalam pemasangan papan informasi pembangunan tersebut, tetapi setelah kami beri peringatan mereka langsung memasang papan informasi terkait pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi”.*

Selanjutnya adalah tanggapan yang diberikan oleh perangkat desa terkait bentuk papan informasi laporan pelaksana pembangunan kepada kepala desa dalam menyampaikan setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan didesa

perhentian luas yakni bapak Almarsidi yang menjabat sebagai Kepala Dusun III mengatakan yaitu:

*“kalau didusun kami, papan plang informasi pelaksanaan pembangunan jarang dipasang, walaupun dipasang terkadang sering terlambat, tak tau juga didusun yang lainnya, yang jelas kami berharap setiap pelaksanaan pembangunan agar diberikan papan informasi agar masyarakat tidak bertanya-tanya terkait pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi”.*

Selanjutnya adalah kita lihat tanggapan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa perhentian luas terkait laporan kegiatan pelaksana kepada kepala desa dalam menyampaikan laporan kegiatan pembangunan desa yaitu Ibu Vivi Susanti, S.Psi yang mengatakan:

*“kami selalu memantau melihat perkembangan dan kedalan pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat, kalau papan informasi pelaksanaan pembangun terkdang mengalami keterlambatan dalam pemasngannya, tetapi hal itu bisa diatasi dengan baik dan untuk pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabpaten kuantan singingi tetap berjalan sebagai mana mestinya.”*

Selanjutnya kita lihat juga pendapat dari masyarakat terkait papan informasi kegiatan pelaksana kepada kepala desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perhentian luas bapak Sepka Arianto yang mengatakan:

*“jarang kami melihat papan plang informasi pada setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perhentian luas, walaupun ada itu juga kurang merata, tidak semua pembangunan ada papan informasinya, kami sangat berharap agar setiap pelaksanaan pembangunan dipasang papan informasinya agar masyarakat secara umum tidak salah faham demi kelancaran pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi kedepannya.”*

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang didapat dengan hasil wawancara dengan informan, dan juga hasil analisa peneliti dilapangan, yang mana untuk papan informasi pembangunan masih terdapat kekurangan, yaitu

masih ada pembangunan yang belum memiliki papan informasi atau keterlabatan pemasangan papan informasi. Tentu hal ini kurang baik bagi pembangunan desa perhentian luas, kami berharap agar permasalahan seperti ini dapat diatasi dengan baik demi kelancaran pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi.

Selanjutnya adalah pertanyaan ketigas masih dengan indikator pertanggungjawaban pejabat terpilih, yang mana pertanyaannya adalah sebagai berikut apakah setiap pelaksanak kegiatan pembangunan sudah memiliki sumber daya manusia dalam setiap kegiatan pembangunan dan pelaporannya di desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat?

Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh kepala desa itu sendiri yakni bapak Drs. Martunus, MM mengatakan bahwa:

*“kalau sumberdaya dalam pelaksanaan pembangunan desa perhentian luas saya rasa sudah cukup memadai, karena dari beberapa orang penanggung jawab kegiatan pembangunan sudah ada yang berpendidikan tinggi, walaupun masih ada juga yang masih berpendidikan aga rendah”.*

Selanjutnya adalah jawaban yang diberikan langsung oleh Sekretaris Desa Perhentian Luas dengan pertnyaan yang sama yaitu bapak Bianca duta Pratama, S.IP adalaha sebagai berikut:

*“kalau pejabat terpilih atau orang yang diberikan kepercayaan sebagai pelaksana pembangunan desa perhentian luas agak lumayan lah, mereka sudah berpendidikan SLTA namun para pekerjanya memang masyarakat secara umum yang masih berpendidikan renndah sebagiannya”.*

Selanjutnya adalah tanggapan yang diberikan oleh perangkat desa terkait bentuk sumber daya pelaksana pembangunan kepada kepala desa dalam

menyampaikan setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan didesa perhentian luas yakni bapak Almarsidi yang menjabat sebagai Kepala Dusun III mengatakan yaitu:

*“kalau sumber daya manusia pelaksana pembangunan terutama penanggung jawabnya memang masih rata-rata SLTA dan SLTP, tetapi saya rasa sumberdaya mereka agak lumayan bagus, hal ini dapat dilihat dari berbagai pengalaman mereka dalam melaksanakan kegiatan pembangunan terutama kegiatan pembangunan didesa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi”.*

Selanjutnya adalah kita lihat tanggapan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa perhentian luas terkait sumber daya pelaksana kepada kepala desa dalam menyampaikan laporan kegiatan pembangunan desa yaitu Ibu Vivi Susanti, S.Psi yang mengatakan:

*“sumber daya adalah kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan, kemampuan mereka bisa dilihat tingkat pendidikan, kalau dilihat tingkat pendidikan pelaksana kegiatan pembangunan desa perhentian luas sudah agak lumayan lah, karena mereka semua sudah ada yang berpendidikan SLTA dan bahkan ada yang berpendidikan lebih tinggi lagi dalam pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan di desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi.”*

Selanjutnya kita lihat juga pendapat dari masyarakat terkait sumber daya pelaksana pembangunan kepada kepala desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perhentian luas bapak Sepka Arianto yang mengatakan:

*“kalau sumber dayanya cukup oke lah, karena mereka sudah sekolah semua, baik itu perangkat desa ataupun penanggung jawab kegiatan pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat, kalau tingkat pendidikan mereka ya campur-campur lah, ada yang berpendidikan seddang ada juga yang berpendidikan tinggi.”*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, dapat dilihat bahwa sumber daya yang dimiliki oleh agen pelaksana atau pejabat yang

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan sudah cukup memadai, karena merek semua sudah merasakan pendidikan dan mempunyai pengalaman dalam bekerja terutama dalam pelaksanaan pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi.

Kalau dilihat secara keseluruhan dari inidikator pertanggung jawaban pejabat terpilih atau orang yang mendapat kepercayaan dalam pelaksanaan pembangunan, masih kategori cukup baik. Hal ini digambarkan dari masih terdapatnya beberapa kekurangan dalam setiap kegiatan ataupun kelengkapan untuk pelaksanaan pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi.

#### **5.2.4 Pengendalian**

Pemabangunan memang menajdi prioritas bagi semua pihak baik itu pemerintah maupun pihak swasta. Setiap pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dana pemerintah tentu harus ada pertanggungjawaban dan perlu pengendalian yang lebih mendalam lagi agar pembangunan lebih terarah dan lebih baik lagi. Yang dimaksud dengan pengendalian dalam penelitian ini terkait dengan pembangunan desa adalah pengawasan secara tertentu atau penentuan arah dari pelaksanaan pembangunan dan juga penggunaan anggaran pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi. Untuk mengetahui pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah desa perhentian luas, peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan untuk dijadikan bahan rujukan dari hasil

penelitian nantinya. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut Apakah kepala desa selalu memantau dan meninjau setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat?

Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh kepala desa itu sendiri yakni bapak Drs. Martunus, MM mengatakan bahwa:

*“pihak pemerintah desa selalu memantau dan meninjau setiap kegiatan pembangunan didesa perhentian luas, tidak hanya sekali, tapi juga peninjauan dilakukan setiap waktu saja dan dilakukan dengan beberapa tahap terhadap pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi”.*

Selanjutnya adalah jawaban yang diberikan langsung oleh Sekretaris Desa Perhentian Luas dengan pertanyaan yang sama yaitu bapak Bianca duta Pratama, S.IP adalaha sebagai berikut:

*“kalau peninjauan dan pemantauan selalu kami laksanakan, saya bersama kepala desa selalu melaksanakan hal itu, baik peninjauan yang dilakukan secara langsung maupun dilaksanakan secara tidak langsung”.*

Selanjutnya adalah tanggapan yang diberikan oleh perangkat desa terkait bentuk peninjauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan didesa perhentian luas yakni bapak Almarsidi yang menjabat sebagai Kepala Dusun III mengatakan yaitu:

*“peninjauan dan pengawasan selalu dilaksanakan, karena bagaimanapun pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk kemajuan desa perhentian luas, pengawasan dan peninjauan dilaksanakan secara merata secara langsung ataupun secara tidak langsung”.*

Selanjutnya adalah kita lihat tanggapan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa perhentian luas terkait penijuan kegiatan pembangunan desa yaitu Ibu Vivi Susanti, S.Psi yang mengatakan:

*“kepala desa selalu melaksanakan peninjauan atau pengawasan terhadap pembangunan desa perhentian luas, terkadang ada juga keterlambatan kepala desa dalam melaksanakan peninjauan dikarenakan oleh kesibukan pekerjaan administrasi desa, tetapi hal itu sudah dapat diantisipasi dan dilaksanakan dengan baik pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kebuapten kuantan singingi.”*

Selanjutnya kita lihat juga pendapat dari masyarakat terkait peninjauan kepala desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perhentian luas bapak Sepka Arianto yang mengatakan:

*“kepedulian kepala desa untuk pembangunan desa cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari aksi kepala desa yang selalu memantau atau meninjau setiap kegiatan pembangunan desa perhentian luas, baik itu kepala desa yang turun langsung kelapangan ataupun perwakilan dari pemerintah desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi.”*

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang didasari dengan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa kepala telah melaksanakan pengawasan dan peninjauan secara berkala, hal ini tentu berdampak baik terhadap pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi.

Berikutnya adalah pertanyaan kedua, masih dengan indikator pengendalian, adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut Bagaimanakah bentuk pengendalian dan pengawasan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat?

Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh kepala desa itu sendiri yakni bapak Drs. Martunus, MM mengatakan bahwa:

*“bentuk pengendalian yang saya lakukan adalah dengan cara turun langsung kelokasi pelaksanaan pembangunan dan juga dengan memberikan beberapa catatan untuk dibuat dalam bentuk laporan, selain itu, saya juga memberikan kepercayaan kepada seluruh masyarakat untuk meninjau secara langsung pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi”.*

Selanjutnya adalah jawaban yang diberikan langsung oleh Sekretaris Desa Perhentian Luas dengan pertanyaan yang sama yaitu bapak Bianca duta Pratama, S.IP adalaha sebagai berikut:

*“peninjauan atau pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala desa terkait pelaksanaan pembangunan desa perhentian luas adalah dengan cara turun langsung kelapangan atau lokasi pelaksanaan pembangunan dan dengan memberikan dokumentasi foto dan video dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabuapten kuantan singingi”.*

Selanjutnya adalah tanggapan yang diberikan oleh perangkat desa terkait bentuk peninjauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan didesa perhentian luas yakni bapak Almarsidi yang menjabat sebagai Kepala Dusun III mengatakan yaitu:

*“kepala desa selalu melaksanakan peninjauan dan pengawasan kelokasi pelaksanaan pembangunan didesa perhentian luas, bentuknya ya dengan turun langsung kelapangan dan membuat beberapa catatan yang dibuat dalam bentuk laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi”.*

Selanjutnya adalah kita lihat tanggapan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa perhentian luas terkait bentuk penijuan kegiatan pembangunan desa yaitu Ibu Vivi Susanti, S.Psi yang mengatakan:

*“kepala desa selalu melaksanakan peninjauan atau pengawasan terhadap pembangunan desa perhentian luas, terkadang ada juga keterlambatan kepala desa dalam melaksanakan peninjauan dikarenakan oleh kesibukan pekerjaan administrasi desa, tetapi hal itu sudah dapat diantisipasi dan dilaksanakan*

*dengan baik pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kebuapten kuantan singingi.”*

Selanjutnya kita lihat juga pendapat dari masyarakat terkait peninjauan kepala desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perhentian luas bapak Sepka Arianto yang mengatakan:

*“kepedulian kepala desa untuk pembangunan desa cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari aksi kepala desa yang selalu memantau atau meninjau setiap kegiatan pembangunan desa perhentian luas, baik itu kepala desa yang turun langsung kelapangan ataupun perwakilan dari pemerintah desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi.”*

Berikutnya adalah pertanyaan ketiga masih dengan indikator pengendalian yang dilakukan oleh kepala desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut Apakah kepala melakukan peninjauan seluruh perangkat desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pelaporan di desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat?

Berikut adalah jawaban dari kepala Desa Perhentian Luas bapak Drs. Martunus, MM yang mengatakan:

*“pengawasan yang saya laksanakan adalah dengan melakukan peninjauan terhadap semua pekerjaan pembangunan didesa perhentian luas, tidak hanya itu setiap kegiatan pemerintahan atau administrasi pemerintahan desa juga selalu saya pantau dan saya awasi proses pelaksanaannya dilapangan”.*

Berikut adalah jawaban dari perangkat desa perhentian luas yaitu bapak Biyanca Duta Pratama, SIP yang menjabat sebagai sekretaris desa perhentian luas mengatakan:

*“selain dari kegiatan pembangunan fisik desa, kepala desa juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan didesa perhentian luas, misalnya menengok absensi kehadiran perangkat desa dan juga meninjau pelayanan yang diberikan perangkat desa ke masyarakat desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi”.*

Berikut adalah jawaban dari perangkat desa perhentian luas yaitu bapak Jupriadis yang menjabat sebagai Kaur Umum desa perhentian luas mengatakan:

*“kami selalu dipantau dan diawasi oleh kepala desa dalam melaksanakan setiap kegiatan pemerintah desa, selain dari kegiatan pembangunan fisik desa, kegiatan dikantor desa juga dilakukan pengawasan dan peninjauan oleh kepala desa, hal ini semua bertujuan agar desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi lebih baik lagi kedepannya terutama dalam bidang pembangunan.”*

Selanjutnya adalah tanggapan anggota Badan Permusyawaratan Desa Perhentian Luas terhadap pembangunan desa yaitu bapak Sudarmono, S.Pd mengatakan:

*“kalau kegiatan pembangunan ya kepala desa sering turun langsung kelapangan untuk meninjau setiap kegiatan yang dilaksanakan didesa perhentian luas, dan kami juga terkadang ikut turuh langsung menemani kepala desa, dalam hal kantor desa, kepala desa juga melakukan pengawasan kepada semua perangkat desa dengan cara membuat absensi kehadiran perangkat desa nya setiap hari kerja”.*

Selanjutnya adalah tanggapan dari masyarakat terhadap pembangunan desa perhentian luas yaitu bapak Zulkifli mengatakan:

*“dalam kami melakukan pelayanan dikantor desa, kami melihat kepala desa sering meninjau kegiatan perangkat desa dan pelayan desa kepada masyarakat, hal ini dalam artian kepala desa selalu meninjau setiap kegiatan yang dilakukan perngkat desa dan juga masyarakat desa terutama dalam kegiatan pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa kepala desa telah melakukan pengawasan dan peninjauan terhadap kegiatan

perangkat desanya, selain itu kepala desa juga telah melaksanakan peninjauan dan pengawasan pada kegiatan pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi.

Dari penjelasan beberapa wawancara dengan informan dan juga dilihat dari beberapa indikator terkait pembangunan desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan didesa perhentian luas, semuanya sudah berjalan cukup baik, tetapi masih ada kekurangan-kekurangan yang dihapai oleh kepala desa dan pemerintah desa secara umum. Dalam artian bahwa akuntabilitas kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa didesa perhentian luas kecamatan logas tanah darat kabupaten kuantan singingi sudah berjalan dengan cukup baik.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang didasari dari hasil wawancara dengan beberapa informan dan juga hasil observasi peneliti dilapangan, diketahui bahwa akuntabilitas kepala Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan cukup baik

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitiandiatas dapat peneliti memberikan beberapa saran yang bertujuan untuk kemajuan Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat kabupaten Kuantan Singingi yang bersifat membangun, yang saran diajukan adalah sebagai berikut :

**6.2.1** Diharapkan Kepala Desa lebih menunjukkan aktif lagi dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat kabupaten Kuantan Singingi

**6.2.2** Kepala Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat kabupaten Kuantan Singingi lebih memprioritaskan pembanguna dibidang pembangunan fisik

**6.2.3** Kepala Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat kabupaten Kuantan Singingi lebih hati-hati dalam membuat laporan keuangan dan pelaksanaan pembangunan desa

**6.2.4** Kepada masyarakat agar selalu mengikuti setiap arahan ataupun himbauan yang disampaikan langsung oleh Kepala Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat kabupaten Kuantan Singingi

**6.2.5** Agar setiap kegiatan pembangunan desa di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat kabupaten Kuantan Singingi dibuatkan papan plang pelaksanaannya, terutama penggunaan anggaran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Halim*, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat : Jakarta
- Adisasmita, Rahardjo*, 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu : Yogyakarta
- Adisasmita, Raharjo*.2013. *Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, Graha Ilmu : Yogyakarta
- Ahmad Tohardi*, 2002, *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya. Manusia*, Universitas Tanjung Pura, Mandar Maju : Bandung.
- Bintoro Tjokroamidjojo*.2011. *Pengantar Administrasi pembangunan*, LP3ES : Jakarta.
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas*. 2016.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta : Bandung
- Ellwood*.2013. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di daerah*. Jakarta: BimaAksara.
- Gunawan, Imam*. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Hasibuan, Malayu*. 2012. *“Manajemen Sumber Daya manusia”*. PT Bumi. Aksara : Jakarta.
- Kartasasmita Ginanjar*. 2013. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo ; Jakarta
- Kessa, Wahyudin*. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi*, 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mardiasmo*, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit. ANDI Yogyakarta.
- Moleong, j, Lexy*. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja. Rosdakarya : Bandung.

- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. PMN : Surabaya.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Polindano, 2010. *Pola-Pola Kepemimpinan Dalam Pemerintahan*. Ceramah pada Coaching Mngement Lembaga Pertahanan Nasional, 2012
- Salam, Darma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan : Jakarta
- Silalahi, Ulber. 2009. *Asas-asas manajemen*; PT. Refika Aditama : bandung
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas – asas manajemen*. ; PT. Refika Aditama : bandung
- Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sondang P. Siagian. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Binapura Aksara : Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2011. *Good Governance ( Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Jakarta : UI Press. Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. PT. Bumi Aksara : Jakarta.
- Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik. Kontemporer*, Kencana. Jakarta
- Widjaja, HAW. 2013. *Otonomi Desa*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

## DAFTAR WAWANCARA

### I. Identitas Peneliti

1. Nama : **WIDA ROSMERIATI**
2. NPM : **160411110**
3. Prodi : Administrasi Negara
4. PT : Universitas Islam Kuantan Singingi
5. Alamat : Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat
6. HP/WA : +62 812-7558-8172
7. Judul : **Akuntabilitas kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di  
Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat  
Kabupaten Kuantan Singingi.**

### II. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Usia :
5. Jabatan :
6. Alamat :

### III. Ketentuan pengisian jawaban pertanyaan

1. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun
2. jawablah pertanyaan dengan benar isilah titi-titik pada ruang yang telah disediakan
3. Identitas Bapak/Ibu dijamin kerahasiaannya
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

### IV. Daftar pertanyaan wawancara penelitian tentang Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat.

#### A. Memberikan Tanggapan berkaitan dengan pembangunan Desa

1. Bagaiamanakah tanggapan kepala desa terhadap pembangunan di desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat ?

.....  
.....  
.....

2. Bagaimanakah respon kepala desa dalam menghadapi permasalahan pembangunan di desa perhentian luas kecamatan logas atanah darat ?

.....  
.....  
.....

3. Bagaimanakah tanggapan kepala desa dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap pembangunan yang ada di desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat ?

.....  
.....  
.....

**B. Memberikan Laporan terkait pembangunan Desa**

1. Apakah kepala desa selalu terbuka dalam memberikan laporan kegiatan pembangunan di desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat ?

.....  
.....  
.....

2. Apakah kepala desa membuat rincian anggaran pembangunan di desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat ?

.....  
.....  
.....

3. Apakah kepala desa selalu tepat waktu dalam memberikan laporan kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat?

.....  
.....  
.....

**C. Pertanggung Jawaban Pejabat Terpilih menyampaikan apa yang telah dilaksanakan**

1. Apakah kepala desa telah memberikan laporan pembangunan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat ?

.....  
.....  
.....

2. Apakah kepala desa memberikan laporan keterangan saat terjadi permasalahan dalam pembangunan kepada masyarakat ?

.....  
.....  
.....

**D. Pengendalian / pengawasan dalam masyarakat**

1. Apakah kepala desa melihat masyarakat dalam pengendalian pembangunan ?

.....  
.....  
.....

2. Apakah kepala desa melihat masyarakat dalam pengawasan pembangunan di desa perhentian luas kecamatan logas tanah darat ?

.....  
.....  
.....



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI**  
**UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

*Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas Jake Telp. (0760)561655 Teluk Kuantan*

**KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : **WIDA ROSMERIATI**  
NPM : **160411110**  
Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**  
Pembimbing I : **ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si**  
Pembimbing II : **EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si**  
Judul Penelitian : **AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM  
PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DI DESA  
PERHENTIAN LUAS KECAMATAN LOGAS TANAH  
DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

No	Hari/Tgl	Materi	Paraf Pembimbing		Paraf Mhs
			Pemb 1	Pemb 2	

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

Pembimbing I

Pembimbing II

**ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si**  
**S.Sos., M.Si**  
**NIDN : 10 08 12 89 02**

**EMILIA EMHARIS,**  
**NIDN: 10 02 05 90 02**

Mengetahui  
Ketua Program studi Administrasi Negara  
Universitas Islam Kuantan Singingi

**DESRIADI, S.Sos., M.Si**  
**NIDN: 10 22 01 83 02**



























## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. Data Diri**

1. Nama : **Wida Rosmeriati**
2. NPM : **160411110**
3. Tempat Tanggal Lahir : Perhentian Luas, 28-November-1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Kawin
7. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Kuantan Singingi
8. Alamat : Desa Perhentian Luas Kec. LTD
9. HP/WA : 081275588172

### **II. Data Pendidikan**

1. SDN 001 Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat
2. SMPN 1 Kecamatan Logas Tanah Darat
3. SMAN 1 Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan tengah
4. S1 Prgram Studi Administrasi Negara UNIKS

Teluk Kuantan, September 2020

**Wida Rosmeriati**